

**RESISTENSI TERHADAP KEBIJAKAN VAKSINASI
COVID-19
(Studi Kasus: Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**SRI MULTI MAILISA
NIM. 180801034
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Multi Mailisa
NIM : 180801034
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Resistensi Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus : Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Sri Multi Mailisa

**Resistensi Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19
(Studi Kasus :Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Mamperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

SRI MULTI MAILISA

NIM. 180801034

**Mahasiswa Program Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP.198812072018032001

Pembimbing II,



Melly Masri, M.I.R

NIP. 199305242020122016

**Resistensi Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19
(Studi Kasus :Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :

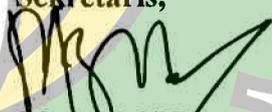
Rabu, 26 Juli 2023
08 Muharram 1445

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001

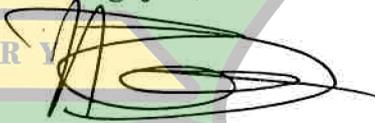
Sekretaris,


Melly Masmi, M.I.P.
NIP. 199305242020122016

Penguji I,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Penguji II,


Renaldi Safriansyah, M.H.Sc.,M.P.M
NIDN. 2007017903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh




Dr. Muji Muha, S. Ag., M.A.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Vaksin Covid-19 sangat penting dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus Covid-19. Maka dari itu kebijakan vaksinasi dilakukan di seluruh masyarakat di Indonesia, mulai dari seluruh provinsi sampai ke gampong-gampong. Pada Selasa pagi 28 September 2021 ratusan masyarakat yang terdiri dari nelayan serta muge melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan vaksinasi di komplek PPI Ujung Serangga, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi di kecamatan Susoh, implementasi kebijakan vaksinasi di kecamatan Susoh, dan faktor struktural pada kerusuhan akibat kebijakan vaksinasi di kecamatan Susoh dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Susoh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan stakeholder yang menjadi kelompok pertama untuk vaksinasi Covid-19. Beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah penolakan yang dilakukan nelayan dan muge terkait kebijakan vaksinasi yang dilakukan di PPI Ujong Serangga Susoh yang disebabkan oleh banyak masyarakat yang takut untuk memasuki kawasan PPI dan hal ini tentu saja menyebabkan berkurangnya konsumen untuk membeli ikan dari hasil tangkapan mereka dan hal juga berpengaruh pada pendapatan sehari-hari.

Kata kunci: *kebijakan, vaksinasi, implementasi, resistensi, nelayan, Susoh*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan atas keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul “RESISTENSI TERHADAP KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 (Studi Kasus: Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang Tua tercinta yaitu Bapak M. Noor dan Ibu Suhairi dan abang saya Burdansyah serta keluarga besar lainnya yang telah mendoakan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
4. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Rizkika Lhena Darwin, M.A. selaku pembimbing I dan Melly Masni M. I. R. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada orang terdekat Irsul Auva, Fitriani, Arifa Makfirah, Ulfa Yofita, dan Cut Ulvia Putri. Serta teman-teman angkatan 2018

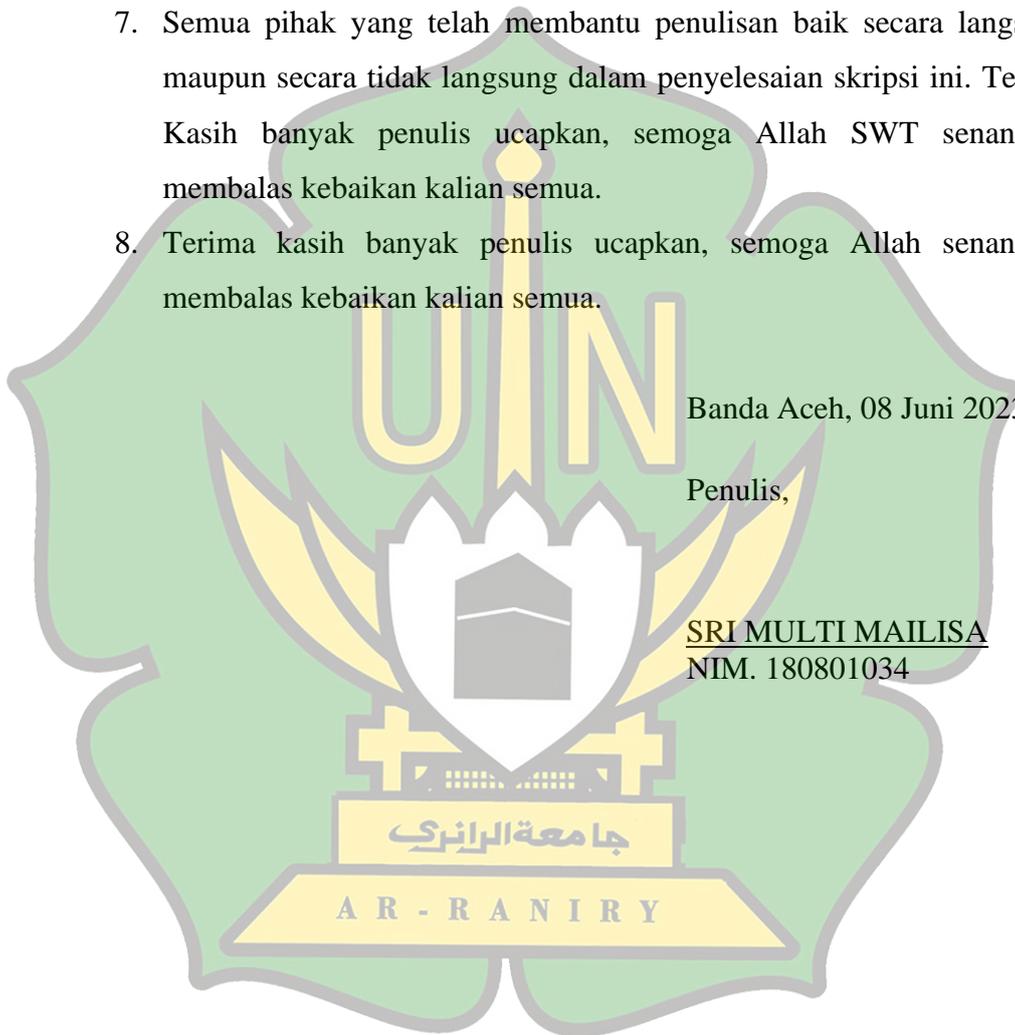
Program Studi Ilmu Politik. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.
8. Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 08 Juni 2023

Penulis,

SRI MULTI MAILISA
NIM. 180801034



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan	6
2.2 Kerangka Teori.....	10
2.2.1 Pengertian Resistensi dan Kerusuhan Sosial (Social Unrest).....	10
2.2.2 Teori Faktor Penyebab Konflik.....	17
2.3 Kerangka Konseptual	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1 Pendekatan Penelitian	19
3.2 Lokasi Penelitian.....	20
3.3 Informan.....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Susoh: Karakter Masyarakat dan Kewilayahan.....	26
4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi Kecamatan Susoh	26
4.1.2 kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Susoh.....	34
4.1.3 Budaya dan Karakter Masyarakat Susoh	37
4.2 Kebijakan Vaksinasi di Kecamatan Susoh Kabupaten: Aceh Barat Daya Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan	38
4.2.1 Implementasi Kebijakan Vaksinasi di Kecamatan Susoh.. Kabupaten Aceh Barat Daya.....	43
4.2.2 Pemetaan Struktural dalam Implementasi Kebijakan Vaksin: stakeholder Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya	49
4.2.3 Faktor Struktural pada Kerusuhan Akibat Vaksinasi di Kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya	51
4.3 Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah.....	58

BAB V KESIMPILAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas Daerah Menurut Desa Tahun 2019	28
Tabel 4. 2 Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Susoh Tahun 2020	30
Tabel 4. 3 Penduduk menurut Desa dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	32
Tabel 4. 4 Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Susoh	33
Tabel 4. 5 Karakteristik Desa di Kecamatan Susoh Tahun 2020.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh Barat Daya memiliki banyak sentral perekonomian, salah satu diantaranya adalah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang terletak di Ujung Serangga, kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Di PPI terdapat banyak aktivitas nelayan dan pedagang yang tentunya akan menciptakan kerumunan. Bersamaan dengan hal ini, kasus kenaikan Covid-19 di Indonesia terus terjadi, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak kebijakan untuk menanggulangi wabah Covid-19, salah satu diantaranya ialah dengan memberlakukan wajib vaksin.

Pandemi Covid-19 diperkirakan akan terus menimbulkan beban mobilitas dan moralitas yang sangat besar dan juga sangat mengganggu masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia. Pemerintah harus siap memastikan akses dan distribusi vaksin Covid-19 dalam skala besar dan adil jika dan ketika vaksin aman dan efektif tersedia.¹ Dalam hal ini juga diperlukan kapasitas sistem kesehatan yang memadai serta strategi agar masyarakat lebih bisa menerima dan bersedia untuk di vaksin.

Jelang vaksinasi Covid-19, Akmal Ibrahim, SH selaku Bupati Aceh Barat Daya mengikuti arahan Menteri Kesehatan yang diberikan melalui Video

¹ Makmun, Amanto, dan Siti Fadhilah Hazhiyah, *Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid 19*, (2020) . Hal 52.

Converence dalam rangka meningkatkan kinerja dan layanan pelayanan Covid-19. Dalam kesempatan ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tujuan dari koordinasi bersama tersebut adalah untuk membahas akselerasi pencapaian vaksinasi dengan target yang telah ditentukan.

Indonesia harus melakukan vaksinasi 181,5 juta penduduk dengan 363 juta dikumpulkan dalam 300-365 hari ekuivalen 1 juta vaksin/hari dan setiap orang akan mendapatkan 2 kali dosis atau suntikan. Pemberian vaksin juga tidak bisa dilakukan sembarangan karena terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan SK Dirjen Vaksinasi Covid-19. Kriteria individu yang diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 menurut SK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait pencegahan dan pengendalian penyakit adalah kelompok prioritas penerima vaksin. Kelompok yang dimaksud adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia (WNI) dengan rentang usia 6-60 tahun. Vaksin tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan, baik asisten, tenaga penunjang, maupun mahasiswa yang sedang menjalani profesi kedokteran. Tahap kedua akan diberikan kepada petugas pelayanan, seperti TNI, kepolisian, petugas bandara/terminal/pelabuhan, perbankan dan kelompok usia diatas 60 tahun. Tahap ketiga akan diberikan kepada masyarakat rentan dalam aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Terakhir atau tahap keempat akan diberikan kepada masyarakat umum dan pelaku perekonomian.

Para tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab dalam menyuntikkan vaksin ke semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali untuk masyarakat kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam melakukan hal ini tenaga kesehatan membuka

banyak Posko vaksinasi di berbagai tempat dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan vaksin.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menggelar pencahangan vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, dalam pencahangan ini Wakil Bupati Aceh Barat Daya Muslizar. MT diberi vaksin perdana Covid-19 dengan jenis vaksin Sinovac kemudian dilanjutkan oleh Dandim 0110/Aceh Barat Daya Letkol. Inf. Arip Subagiyo dan Kapolres Aceh Barat Daya AKBP. Muhammad Nasution, SIK. Pemberian Vaksinasi ini diberikan pertama kali khusus pejabat pemerintah daerah dan dilanjutkan dengan tenaga kesehatan.

Di Aceh Barat Daya Posko vaksinasi dapat ditemukan di setiap gampong, namun kegiatan vaksinasi tidak dilakukan setiap hari, tetapi tergantung dengan jadwal dan ketersediaan vaksin itu sendiri. Tidak hanya terdapat di setiap gampong, Posko vaksinasi juga terdapat di Rumah Sakit Daerah Teungku Peukan, Puskesmas-Puskesmas di Aceh Barat Daya dan juga di PPI Ujong Serangga.

Pada Selasa pagi 28 September 2021 ratusan masyarakat yang terdiri dari nelayan serta muge melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan vaksinasi di komplek PPI Ujung Serangga, Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di Mushalla yang ada di dalam komplek tersebut. Akibat aksi demo ini, sejumlah alat medis, dokumen, meja dan kursi yang ada di lokasi rusak, tidak hanya itu satu orang tenaga kesehatan mendapatkan lebam akibat terkena benturan kursi plastik.

Keraguan akan vaksin ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan global. Pemerintah, dan tim kesehatan harus siap mengatasi keraguan dan harus membangun literasi yang baik sehingga masyarakat dapat menerima imunisasi pada saat yang tepat. Penyebaran informasi yang salah melalui berbagai saluran dapat berdampak besar pada penerimaan vaksin Covid-19.²

Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan.³

Berikut data laporan vaksinasi Covid-19 di Aceh Barat Daya, pada tanggal 16 September 2022, (Online, sumber data: KPC PEN). Peserta yang sudah melakukan vaksinasi (status 1) berjumlah 74906, dengan cakupan 95.6%. Peserta yang sudah di vaksin (status 2) berjumlah 63804, dengan cakupan 81.5%. Kemudian Peserta yang sudah di vaksin (status 3) berjumlah 31000, dengan cakupan 39.6%.

²Lushington, Gerald H, *Perspective On The COVID-19 Coronavirus Outbreak*,(2020). Hal 90-91.

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Saku Protokol Tatalaksana COVID 19 ED2*,(2021). Hal 1-100.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya kericuhan terkait penolakan vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya kericuhan terkait penolakan vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan, pemahaman serta diharapkan bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat vaksinasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan terkait vaksinasi.
- b. Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan masyarakat terkait manfaat vaksinasi.
- c. Penelitian ini juga diharapkan bisa menimbulkan rasa kepekaan masyarakat terhadap kesehatan dirinya sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Setelah menyusun serta melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul “Resistensi Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan pustaka dengan membaca artikel, jurnal, dan skripsi sebagai bahan dalam melengkapi data referensi. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Nining Puji Astuti, dkk, dalam jurnal yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review” yang diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tujuan penulisan jurnalnya adalah untuk mengetahui tentang persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19. Metode yang digunakan adalah literatur review menggunakan data base berbasis online dengan penelusuran elektronik pada google dan google scholar yang dilakukan sejak tanggal 13 april 2021 sampai 30 april 2021. Hasil penelitian didapati persepsi yang salah ini muncul karena kurangnya komunikasi yang baik dari pihak-pihak berwajib seperti tenaga kesehatan untuk menyakinkan masyarakat tentang keefektifan vaksin COVID-19. Dampak lain yang timbul jika masyarakat terus menimbun keragu-raguan dan tidak membiarkan diri untuk di vaksin ialah akan terjadi kelumpuhan ekonomi, sosial dan pariwisata di seluruh

dunia. Selain itu angka pengangguran akan melonjak semakin tinggi dan menimbulkan masalah kesehatan lain.⁴

Dina Indriyanti, dengan judul jurnal “Persepsi Petugas Puskesmas Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Era New Normal” yang diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petugas puskesmas terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada era new normal dalam kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19. Metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan menyebar kuesioner menggunakan google formulir kepada 38 petugas puskesmas, yang dipilih sebagai informan karena merupakan sasaran prioritas penerima vaksinasi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa persepsi petugas puskesmas terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di era new normal menunjukkan bahwa berdasar persepsi terhadap keberhasilan vaksinasi, 61,5% menyetujui vaksinasi Covid-19 dapat mengurangi kematian dan 63,2% sangat setuju bahwa status sebagai petugas puskesmas memudahkan dalam memperoleh vaksinasi.⁵

Nurhayani, Wisnu Hidayat, Evawani Silitonga, dengan judul jurnal “Analisis Studi Kasus Penolakan Tenaga Kesehatan Terhadap Pemberian Vaksin Covid-19 di Lingkungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021”. Pada tahun 2021. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis penolakan tenaga kesehatan terhadap pemberian

⁴ Nining, Dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review*, (2021) hal 575.

⁵ Dina Indriyanti, *Persepsi Petugas Puskesmas Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Era New Normal*,(Jawa Barat :2021) . Hal, 31.

vaksin Covid-19 di lingkungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 3 informan dapat diartikan tidak yakin dengan vaksin yang diberikan kepada tenaga kesehatan diantaranya karena vaksin tersebut produk dari Cina dan karena efektivitas dari vaksin sangat rendah mereka tidak mempercayai bahwa vaksin tersebut halal, sertifikat halal dari MUI itu tidak ada.⁶

Kirana Eka Putri, dkk, dengan judul jurnalnya “Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19” tahun terbit 2021. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan gambaran kecemasan terhadap vaksin Covid-19 pada masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode kuantitatif dengan desain *survey crosssectional*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 81.2 % responden bersedia divaksin, 48.1 % responden mengalami kecemasan terhadap vaksin.

Devica Zein dengan judul Skripsi “Opini Masyarakat Kabupaten Bireuen Terhadap Program Vaksinasi Covid-19” yang diterbitkan pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui opini masyarakat kabupaten Bireuen terhadap program vaksinasi Covid-19. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah ada faktor psikologis Covid-19 berhasil menimbulkan kecemasan terhadap diri informan, pada faktor sosiologi politik informan merasa pemerintah perlu meningkatkan lagi

⁶ Nurhayani, ddk, *Analisis Studi Kasus Penolakan Tenaga Kesehatan Terhadap Vaksin Covid-19 di lingkungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021*, (Universitas Ubudiyah Indonesia: 2021) . Hal, 1612.

upaya pemutusan rantai Covid-19, pada faktor budaya pandangan informan terhadap vaksinasi belum semuanya positif dan budaya ikut-ikutan masih sangat dominan, dan untuk faktor media massa informan berpendapat bahwa berita yang beredar di media massa mengenai Covid-19 tergantung bagaimana kita sendiri menanggapinya.

Hendry Naufal Marbella, Nadira Hanifah Nur'aini, dkk, dengan judul jurnal "Analisis Pengaruh Berita Bohong di Sosial Media Terhadap Keputusan Masyarakat Indonesia Melakukan Vaksinasi Covid-19" yang diterbitkan pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan opini dan pertimbangan masyarakat dalam melakukan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah responden menyatakan bahwa mereka akan berpikir dua kali untuk menerima vaksinasi Covid-19 setelah melihat mempersembahkan berita bohong yang ada di media sosial.

Shania Carrity Virginia Woisiri, Lyna Hutapea, dengan judul jurnal "Gambaran Penolakan Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 di Wilayah Kampung Doyo Baru Kabupaten Jayapura". Tahun terbit jurnal 2021. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 di wilayah Kampung Doyo Baru Kabupaten Jayapura. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian etnografi dan penelitian yang dilakukan di Kampung Doyo Baru Kecamatan Jayapura. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 6 dari 24 subjek yang mengetahui

manfaat vaksin yaitu untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari paparan virus Corona. Terdapat 4 orang subjek yang mengatakan bahwa vaksin Covid-19 mengandung bahan yang haram menurut keyakinan mereka, sedangkan subjek yang lain masih merasa ragu atas efektivitas vaksin Covid-19 setelah mendengar isu yang beredar dan ada juga yang memilih untuk menolak vaksinasi karena adanya larangan dari orang tua dan anggota masyarakat lainnya. Penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 karena kekurangan fasilitas yang memadai di kalangan masyarakat untuk mengetahui manfaat vaksinasi.

2.2 Kerangka Teori

2.2.2 Pengertian Resistensi dan Kerusuhan Sosial (Social Unrest)

Resistensi adalah perlawanan atau penentangan. Biasanya terjadi antara dua pihak atau lebih, dikarenakan relasi-relasi yang bersifat kontradiktif, subordinatif, dan koordinatif. Berbagai bentuk relasi tersebut mengandung potensi konflik di dalamnya sehingga resistensi akan terjadi dari salah satu pihak. Resistensi dapat dilakukan secara formal ataupun tidak formal, bergantung pada bentuk jenis resistensi dan pihak-pihak yang terlibat.

Dari segi pihak yang terlibat resistensi dapat melibatkan perseorangan atau kelompok saling berhadapan, pihak buruh dengan majikan, bawahan dengan atasan, rakyat dengan negara, negara satu dengan negara lain, dan sebagainya. Secara umum dapat dipahami bahwa yang dimaksud resistensi adalah perlawanan pihak yang terdominasi berhadapan dengan pihak yang mendominasi.

Relasi dominasi-terdominasi dapat bersifat ekonomi, politis, psikologi bahkan sesuatu yang bersifat kultural atau sesuatu yang lebih kompleks yakni interseksi dari berbagai hubungan dominasi terdominasi tersebut. Hal-hal tersebut menentukan bagaimana resistensi di praktikan. Resistensi dominasi-terdominasi menyebabkan resistensi dapat dilakukan secara diam-diam (sembunyi), menghindar, verbal, simbolik, hingga penggunaan-penggunaan kekerasan (bersifat fisik). Dalam kehidupan sehari-hari resistensi sangat sering terjadi. Jika ada pertentangan maka di dalamnya terdapat resistensi. Variabel lain yang penting dipertimbangkan tentang resistensi adalah variable agama, ras, kelas, dan gender. Di atas semua itu, tentulah nilai dan norma-norma budaya berpengaruh terhadap praktik resistensi.⁷

Kerusuhan adalah suatu keadaan yang kacau, ribut, gaduh, dan huru-hara. Kerusakan merujuk pada aksi kolektif yang spontan, tidak terorganisasi, tidak bertujuan, dan biasanya melibatkan penggunaan kekerasan, baik untuk menghancurkan, menjarah barang, atau menyerang orang lain.

Penyebab kerusuhan sosial sering kali berfokus pada peran, baik faktor struktural maupun faktor difusi. Faktor struktural dan difusi sama-sama berinteraksi dengan cara yang penting. Misalnya, peningkatan faktor lokal akan mempengaruhi keresahan secara lokal, tetapi kerusuhan ini akan menyebar dan menyebabkan keresahan di daerah lain juga. Selain itu, faktor struktural di lokasi

⁷ Aprinus Salam dan Rina Zuliana. *Politik Resistensi Dalam Masyarakat Jawa Poskolonial*. Tahun 2022. Semiotika. Vol 23. Hal 92.

tertentu dapat membantu menentukan seberapa rentannya terhadap kerusuhan yang menyebar dari daerah lain.

Faktor struktural mempengaruhi kerusuhan sosial dan membahas tiga isu yang terkait yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi, organisasi dan represi. Pertimbangan efek perubahan faktor lokal terhadap jumlah total kerusuhan di suatu daerah mempunyai efek langsung dan efek tidak langsung. Efek perubahan langsung adalah di lokasi dimana perubahan itu terjadi, sedangkan efek tidak langsung kerusuhan ini di daerah lain melalui difusi. Misalnya, memburuknya kondisi ekonomi di suatu lokasi dapat mengakibatkan kerusuhan di sana, yang kemudian menyebar ke tempat lain. Oleh karena itu, perubahan faktor struktural telah menimbulkan keresahan dimana perubahan faktor tersebut terjadi dan menyebabkan keresahan di daerah lain melalui difusi. Akhirnya, apakah kerusuhan menyebar ke lokasi tertentu juga akan bergantung pada faktor struktural lokasi itu.

Kerusuhan seringkali melibatkan pergerakan cepat orang-orang yang datang dari berbagai tempat tetapi konsentrasi di suatu tempat sejumlah kecil lokasi. Ini berarti bahwa jumlah insiden cenderung relatif kecil, sehingga variasi *cross-sectional* nya terbatas. Seringkali juga sulit untuk menentukan nilai-nilai struktural apa yang harus digunakan, karena faktor-faktor struktural yang mempengaruhi individu-individu yang berpartisipasi belum tentu berasal dari lokasi terjadinya kerusuhan.

Literatur tentang penyebab kerusuhan sosial menekankan baik peran faktor struktural yang membuat individu lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam proses difusi melalui mana kerusuhan ini menyebar antar daerah. Hubungan yang berfokus pada interaksi antara tiga jenis faktor struktural dan proses difusi. Kelompok faktor pertama berkaitan dengan motivasi yaitu orang yang membutuhkan alasan untuk berpartisipasi. Kedua, kerusuhan sosial hanya terjadi ketika sejumlah individu yang cukup berpartisipasi, dan ini mungkin memerlukan kehadiran pemimpin atau beberapa bentuk organisasi. Ketiga adalah konsekuensi potensial berupa represi akan membantu setiap individu memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam kerusuhan tersebut atau tidak.

Setelah kerusuhan dimulai, individu dapat memutuskan untuk bergabung sebagai akibat dari apa yang mereka lihat terjadi di area lain, dan proses difusi ini dapat berinteraksi dengan faktor struktural. Misalnya, perubahan faktor di lokasi ini akan mempengaruhi keresahan secara lokal, yang pada gilirannya dapat menyebabkan keresahan di lokasi lain melalui difusi. Selanjutnya, faktor struktural memediasi difusi ini, dalam arti bahwa kondisi di lokasi lain dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kerusuhan sebagai akibat dari lokasi tadi.

a. Motivasi

Banyak faktor yang dapat memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam kerusuhan sosial. Peneliti awal Amerika Serikat mengidentifikasi dua faktor yang membuat kota lebih mudah mungkin mengalami kerusuhan ras, fraksi penduduk Afrika-Amerika dan lokasinya di selatan. Sejak itu literatur telah melihat kasus

lain dan faktor lain, termasuk kemiskinan dan guncangan pendapat, demografi, dan keragaman etnis dan agama. Myers (1997) menemukan bahwa tekanan ekonomi dan migrasi di Amerika Serikat membantu menjelaskan frekuensi kerusuhan ras pada tahun 1960-an. Persaingan etnis adalah pendorong utama kerusuhan di Amerika Serikat, dan menyoroti interaksi antara kelangkaan ekonomi dan kekuatan politik dalam menentukan insiden imigran.

Faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi bagaimana individu menanggapi kerusuhan yang terjadi di dekat mereka. Individu memiliki ambang batas partisipasi yang berbeda, dan faktor sosial ekonomi dapat membantu menentukan ambang batas ini. Misalnya, deprivasi bisa membuat individu lebih mungkin untuk meniru tindakan tetangga mereka.

b. Kapasitas Organisasi

Literatur mengambil dua pandangan berbeda tentang peran kapasitas organisasi, konsisten dengan perbedaan antara spontanitas dan organisasi. Yang pertama menafsirkan kerusuhan sebagai respon spontan terhadap faktor struktural dengan organisasi lokal minimal atau koordinasi antar individu. Ini konsisten dengan sifat desentralisasi dari banyak kerusuhan dan dengan gagasan bahwa kerusuhan dapat terjadi secara spontan. Pandangan kedua tanggal kembali setidaknya teori mobilisasi sumber daya, yang menekankan pentingnya asosiasi dan rasionalitas aktor dalam mengorganisir tindakan kolektif. Misalnya, menyoroti pentingnya organisasi internal gerakan, fokus pada peran pengambilan keputusan organisasi, interaksi antara motivasi dan kapasitas, dengan alasan

bahwa kelas industri dan menengah paling baik ditempatkan untuk memelopori gerakan yang sukses karena mereka yang paling mungkin melihat manfaat tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan (kapasitas). Misalnya, para pemimpin dapat membantu mengorganisasi aktif kolektif. Beberapa penelitian telah meneliti peran pemimpin dalam kerusuhan sosial, termasuk yang menganggap peran dimainkan oleh agen perubahan profesional.

Pemimpin juga bisa memainkan peran penting dalam proses difusi. Misalnya, dapat terinformasi tentang apa yang terjadi di tempat lain dan ditempatkan lebih baik untuk mengorganisir aksi lokal sebagai tanggapan. Para pemimpin mengasumsikan peran yang dalam literatur difusi yang lebih umum dimainkan oleh para inovator dan pengadopsi awal. Oleh karena itu, daerah dengan lebih banyak pemimpin seharusnya lebih mungkin mengalami keresahan sebagai akibat dari difusi.

c. Represi

Karena represi dapat meningkatkan biaya partisipasi, kami berharap untuk melihat lebih sedikit kerusuhan di daerah-daerah dengan lebih banyak represi. Kerusuhan terjadi hanya jika aparaturnegara memutuskan untuk tidak menindasnya, yang pada gilirannya tergantung pada insentif pemilu. Secara umum, literatur menemukan hasil yang bertentangan yang konsisten dengan gagasan dalam literatur ancaman dan peluang bahwa represi dapat memicu lebih banyak kerusuhan (ancaman), tetapi kurangnya represi memungkinkannya

(peluang). Represi dapat menyebabkan lebih banyak kerusuhan jika, misalnya, menyebabkan kemarahan di dalam populasi.

Represi adalah inti dari banyak model difusi yang terkenal, yang menyatakan bahwa ancaman hukuman dapat mencegah individu untuk berpartisipasi. Dengan kata lain represi dapat menghalangi kerusuhan yang akan terjadi. Tapi represi bisa dengan mudah menggantikan kerusuhan atau bahkan meningkatkannya.

d. Difusi

Difusi kerusuhan sosial memiliki banyak ciri yang sama dengan difusi teknologi, dimulai dari penghasut di suatu lokasi, dan menyebar ketika individu ditempat lain memutuskan untuk bergabung.

Kerusuhan melibatkan (kekacauan) fisik yang menimpa masyarakat sipil dengan gejala kasat mata berupa bentrokan antar manusia, dari perkelahian massal sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan berbagai sarana dan prasarana, baik fasilitas pribadi maupun fasilitas umum ataupun tindak pidana lain.

Menurut Horton dan Hurler kerusuhan mencangkup pemeran kekuatan, penyerangan terhadap kelompok yang tidak disenangi, perampasan dan pengrusakan harta benda, terutama milik kelompok yang dibenci. Setiap seseorang yang melakukan dukungan dan kebebasan dari tanggung jawab moral, dapat mendorong hati seseorang untuk melakukan hal yang sama. Secara psikologi, jika seseorang yang berada dalam perasaan bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan dan mengenalnya dalam sebuah kerumunan maka seseorang

tersebut lebih mudah untuk meniru orang yang ada di kerumunan tersebut. Hal inilah yang menjadikan anggota kerumunan menjadi lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang agresif dan destruktif.

Menurut Gustave Le Bon didalam Sarwono Sarlito menyebutkan bahwa kelompok memang lebih agresif dibandingkan dengan individu, karena jiwa kelompok lebih irasional, lebih impulsif (meledak-ledak), dan lebih kekanak-kanakan dari pada jiwa individu sebagai perseorangan.

2.2.2 Teori Faktor Penyebab Konflik.

Untuk membahas faktor penyebab konflik peneliti menggunakan analisis *Structural, Accellerator* dan *Trigger* (SAT) dimana Ichsan Malik membagi faktor konflik menjadi tiga bagian yaitu struktural, akselerator, serta pemicu konflik/*trigger*.

- Struktural merupakan sumber konflik sebenarnya dan paling mendasar.
- Akselerator yaitu reaksi-reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik.
- Pemicu merupakan faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik.⁸

2.3 Kerangka Konseptual

Permasalahan penolakan vaksin di Indonesia tidak dapat dihindari.

Pemerintah indonesia membuat kebijakan vaksinasi bagi penduduk Indonesia

⁸ Yusuf Chandra Negara dkk. *Land Conflict Resolution In Buluspasantren Sub-District, Kebumen District*. Tahun 2019. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik. Vol 5. Hal 68.

tentunya seluruh masyarakat yang ada, baik di provinsi hingga ke desa-desa, hal ini dilakukan dalam rangka memutus penularan Covid-19. Pada kasus yang terjadi di Kecamatan Susoh, terdapat muge dan nelayan yang melakukan penolakan terhadap vaksinasi Covid-19. Penolakan ini berakhir dengan kericuhan yang terjadi pada Selasa pagi 28 September 2021 di kompleks PPI Ujong Serangga. Puluhan dari muge dan nelayan awalnya hanya melakukan aksi demonstrasi terhadap penolakan vaksin. Aksi demonstrasi ini mulanya hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, namun seiring berjalannya waktu banyak muge dan nelayan yang ikut-ikutan, sehingga aksi yang dilakukan secara spontan tersebut berakhir dengan kericuhan.

Tujuan dari aksi tersebut adalah supaya kegiatan vaksinasi tidak dilakukan di sekitar PPI, karena nelayan dan muge berpendapat bahwa kegiatan tersebut sangat mengganggu aktivitas mereka dan juga mereka berpendapat bahwa masyarakat ikut takut masuk ke PPI karena takut untuk divaksin dan hal ini tentu saja menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan dari nelayan. Jadi dapat dipastikan bahwa penurunan pendapatan menjadi alasan utama terjadinya kericuhan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah penelitian ini menekankan pada makna, penalaran, definisi, dan suatu situasi tertentu. Dimana pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi.

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang akan diteliti. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sumpling bahkan populasi atau sumplingnya sangat terbatas. Jika data yang dikumpulkan data sudah dikumpulkan dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya.⁹ Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas data).¹⁰ Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam diteliti dan digali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Dari segi besarnya responden ataupun objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit

⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Cet II, (Jakarta: Kencana, n.d.). Hal, 58.

¹⁰ Ibid, Rachmat Kriyantono, hal. 59-60.

dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, dikarenakan penelitian kualitatif lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kualitas data.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu teknik pengumpulan data menggunakan data primer dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber tulisan yang terdahulu baik berupa skripsi, jurnal, laporan, artikel dan lainnya. pengumpulan data juga menggunakan cara wawancara terhadap masyarakat dan pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya dan juga ditunjang dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa jurnal, dokumen, surat kabar dan data primer melalui wawancara mendalam kepada informan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih atau sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Adapun dalam penulisan ini, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya, kecamatan Susoh.

3.3 Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi, berdasarkan dengan judul penelitian yaitu Resistensi Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya). Teknik pengambilan informan pada penelitian tertentu yakni untuk mendapatkan data penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan. Informan yang peneliti mewawancarai

¹¹ Suwandi (last) and Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.). hal. 28.

diantaranya adalah pemerintah Kecamatan Susoh, Kapolsek Susoh, panglima laot, dan masyarakat umum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit, penelitian menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sugiono mengatakan teknik metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tinjauan dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan langsung antara pengumpul data dengan sumber data, wawancara dilaksanakan secara langsung untuk menentukan keterangan dari sumber data. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk setiap responden. Selain membawa instrumen sebagai pedoman wawancara, peneliti juga membawa alat bantu merekam yang dapat membantu kelancaran

pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan pada nelayan, penjual ikan, masyarakat umum, dan petugas kesehatan.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik wawancara mampu menggali pengetahuan, pendapat, dan pendirian seseorang mengenai suatu hal. Wawancara secara langsung dilaksanakan dengan orang yang menjadi sumber data tanpa perantara mengenai diri dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Sedangkan wawancara tidak langsung, dilakukan dengan seseorang tetapi berkenaan dengan diri atau peristiwa lain dengan dirinya.

Ketika melakukan teknik wawancara ada yang dinamakan wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Misalnya seperti Peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan terhadap topik penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan data.

Menurut Ulber Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden. Peneliti memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut. Ketika responden merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang

diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada setiap orang responden dalam peristiwa yang sama.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang berupa data tertulis yang berbentuk tulisan, atau gambar. Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data-data berdasarkan yang ada di tempat kajian juga melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menganalisis data-data yang ada sehingga menghasilkan sebuah data yang baru.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah terkumpul kemudian peneliti mereduksi data, lalu menyajikan data dan verifikasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain setelah data terkumpul maka peneliti akan memverifikasi mana yang dianggap data-data yang penting sesuai dengan permasalahan dan mana data-data yang dianggap kurang penting, maka setelah itu peneliti akan menggunakan metode teknik analisis data deskriptif.

Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman antara lain reduksi data, display data dan menarik kesimpulan.¹² Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiono analisis data dalam metode kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan pengumpulan data dalam metode tertentu. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa :

a) Data *reduction* (reduksi data)

Dalam reduksi data dapat dirangkumkan dan menentukan hal pokok atau hal yang terpenting agar menemukan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam penelitian.

b) Data *display* (penyajian data)

Display data merupakan suatu proses untuk memperoleh data secara sederhana seperti dalam bentuk kata, kalimat, naratif, tabel, matrik, maupun dalam bentuk grafik, yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat dikuasai oleh penulis sebagai dasar untuk memahami kesimpulan yang tepat. Menurut Miles dan Huberman penyajian data display adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹³

c) Data *Conclusion drawing/verification*

Langkah yang ketiga dalam yang menganalisis data kualitatif adalah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi. Jika ditemukan bukti-bukti yang ditemukan dan mendukung pada tahap pengumpulan data awal yang

¹² Milles, M. B, Huberman, M. dan Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (London; SAGE).

¹³ Matthew B Miles and Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta; UI Press, 1992). Hal. 16.

valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Susoh: Karakter Masyarakat dan Kewilayahan

Susoh adalah sebuah kecamatan di kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Indonesia. Susoh terletak di pesisir pantai Barat Aceh dan tidak memiliki wilayah pegunungan sehingga menjadi rujukan wisata bahari di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Negeri Susoh didirikan oleh Datuk Baginda dan Datuk Tuha yang awal kedatangannya dimulai sejak tahun 1665 M dari Pariaman Sumatera Barat, hingga sampai ke daratan ini di tahun 1666 M. Para pendiri Susoh adalah mereka yang berdarah Aceh menetap di Minangkabau sebagai wakil Sultan Aceh yang berkuasa selama 40 tahun di Pariaman, kemudian terusir akibat adanya Traktat Painan dan serangan dari VOC serta masyarakat Minang.

4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi Kecamatan Susoh

Kecamatan Susoh adalah salah satu Kecamatan yang terletak di bagian Utara Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatasan dengan Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Jeumpa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Setia dan Kecamatan Blangpidie dan disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Blang Pidie. Kecamatan Susoh terletak di pesisir pantai Barat Aceh dan tidak memiliki wilayah pegunungan sehingga menjadi rujukan wisata bahari di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Susoh merupakan salah

satu dari sembilan kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Susoh menempati luas wilayah sekitar 1,01% (19,05 km²) dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar wilayah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser, kecamatan Susoh dengan ibu kota kecamatan yaitu Padang Baru, jarak ibu kota kecamatan Susoh dengan Kabupaten Aceh Barat Daya 5 km.

Kecamatan Susoh terdiri dari lima Mukim, berikut kelima mungkin di Kecamatan Susoh:

- Mukim Rawa
- Mukim Palak Kerambil
- Mukim Durian Rampak
- Mukim Pinang dan
- Mukim Sangkalan,

Kecamatan Susoh juga terdapat 29 desa serta 85 dusun. Terletak antara pesisir pantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah Selatan dan Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Jeumpa di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Blang Pidie, Kecamatan Setia dan Kecamatan Blangpidie di sebelah timur.

Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, yang cenderung dekat dengan pesisir pantai Kecamatan Susoh mempunyai pelabuhan laut sebagai pintu masuk dan keluar berbagai

macam barang seperti semen dan juga CPO. Terletak di kawasan Ujung Serangga Desa Padang Baru.

Berikut adalah tabel geografis gambaran umum Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

a. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

Tabel 4. 1
Luas Daerah Menurut Desa Tahun 2019

Desa	Luas ¹ (km²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
(1)	(2)	(3)
001 Kedai Susoh	0,13	0,7
002 Panjang Baru	0,47	2,5
003 Kedai Palak Kerambil	0,06	0,3
004 Ladang	1,56	8,2
005 Padang Panjang	0,68	3,6
006 Rubek Meupayong	0,49	2,6
007 Cot Mancang	0,94	4,9
008 Lampoh Drien	0,39	2
009 Meunasah	0,63	3,3
010 Blang Dalam	1,11	5,8
011 Palak Hulu	0,12	0,6

012 Palak Hilir	0,03	0,2
013 Rumah Dua Lapis	0,06	0,3
014 Durian Jangek	0,04	0,2
015 Baharu	0,05	0,3
016 Pinang	0,06	0,3
017 Rumah Panjang	0,08	0,4
018 Padang Baru	1,15	6
019 Pulau Kayu	1,21	6,4
020 Ujung Padang	2,03	10,7
021 Pawoh	0,91	4,8
022 Barat	0,39	2
023 Durian Rampak	0,21	1,1
024 Pantai Perak	0,91	4,8
025 Padang Hilir	0,15	0,8
026 Gadang	0,73	3,8
027 Tangah	0,19	1
028 Kepala Bandar	0,77	4
029 Geulima Jaya	3,5	18,4
SUSOH	19,05	1,00

Jumlah penduduk Kecamatan Susoh Tahun 2020 berjumlah sekitar 24.619 jiwa dengan rincian 12.372 jiwa laki-laki (50,25%) dan 12.247 jiwa perempuan (49,75%). Jika dibandingkan dengan total penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya

yaitu sekitar 16,33%. Tercatat sebanyak 2.513 jiwa mendiami Desa Padang Baru dan menjadikannya desa dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Susoh. Sedangkan Desa Kedai Susoh mempunyai penduduk paling sedikit dalam Kecamatan Susoh sebanyak 257 jiwa¹⁴.

b. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Tabel 4. 2

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Susoh Tahun 2020

Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km²)
1	2	3
001 Kedai Susoh	257	1.977
002 Padang Baru	687	1.457
003 Kedai Palak Kerambil	457	7.617
004 Ladang	1.274	817
005 Padang Panjang	877	1.290
006 Rubek Meupayong	1.101	2.247
007 Cot Mancang	691	739
008 Lampoh Drien	552	1.415
009 Meunasah	575	913

¹⁴ Waldy Kurniawan, *Kecamatan Susoh Dalam Angka 2021*, (Aceh Barat Daya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2021). Hal, 53.

010 Blang Dalam	570	514
011 Palak Hulu	371	3.092
012 Palak Hilir	349	11.633
013 Rumah Dua Lapis	315	5.250
014 Durian Jangek	308	7.700
015 Baharu	291	5.820
016 Pinang	550	9.167
017 Rumah Panjang	344	4.300
018 Padang Baru	2.513	2.187
019 Pulau Kayu	1.895	1.566
020 Ujung Padang	847	417
021 Pawoh	1.279	1.405
022 Barat	417	1.069
023 Durian Rampak	1.073	5.110
024 Pantai Perak	1.011	1.111
025 Padang Hilir	1.118	7.453
026 Gadang	1.086	1.488
027 Tengah	937	4.932
028 Kepala Bandar	1.826	2.371
029 Geulima Jaya	1.050	300
JUMLAH	24.619	95.351

c. Jumlah penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin

Tabel 4. 3

Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Susoh Tahun 2020

Jumlah Penduduk (Jiwa)			
Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
001 Kedai Susoh	116	141	257
002 Padang Baru	339	346	685
003 Kedai Palak Kerambil	237	220	457
004 Ladang	661	613	1.274
005 Padang Panjang	438	439	877
006 Rubek Meupayong	559	542	1.101
007 Cot Mancang	355	336	691
008 Lampoh Drien	269	283	552
009 Meunasah	286	289	575
010 Blang Dalam	293	277	570
011 Palak Hulu	189	182	371
012 Palak Hilir	170	179	349
013 Rumah Dua Lapis	162	153	315
014 Durian Jangek	154	154	308
015 Baharu	149	142	291
016 Pinang	278	272	550

017 Rumah Panjang	177	167	344
018 Padang Baru	1.234	1.279	2.513
019 Pulau Kayu	955	940	1.895
020 Ujung Padang	430	417	847
021 Pawoh	649	630	1.279
022 Barat	199	218	417
023 Durian Rampak	529	544	1.073
024 Pantai Perak	482	529	1.011
025 Padang Hilir	586	532	1.118
026 Gadang	529	557	1.086
027 Tengah	482	455	937
028 Kepala Bandar	932	894	1.826
029 Geulima Jaya	533	517	1050
JUMLAH	12.372	12.247	24.619

d. Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 4. 4

Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

Jumlah Kepala Keluarga		
Kepala Keluarga	Jumlah	Ket
jumlah kepala keluarga	2597	Kartu Keluarga

4.1.2 kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Susoh

Pertanian dan peternakan masih memegang peranan penting dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat. tahun 2020 tercatat seluas 768 Ha lahan sawah teknis. Sedangkan untuk peternakan tercatat sebanyak 547 4 ekor kerbau, 450 ekor sapi, 2.313 ekor kambing/domba dan 58.447 ekor unggas

Pada umumnya industri belum dapat berkembang dengan baik di Aceh terkhususnya di Aceh Barat Daya. sebagian besar masih bersifat industri rumah tangga, sebagai daerah potensi perikanan, terdapat beberapa pabrik es untuk kebutuhan para nelayan dan sekitar Pelabuhan Ujung Serangga Desa Padang Baru.

Mata pencarian masyarakat Susoh bermayoritas sebagai nelayan, berdagang, dan sebagian kecil ada juga yang bertani, seiring perkembangan zaman dengan kemajemukan, hidup dan terus berkembang. Masyarakat Susoh telah banyak bekerja sebagai pedagang, pengusaha, pejabat PNS, dan lain sebagainya.¹⁵ Pertanian di daerah ini masih mengandalkan tanaman pangan sebagai hasil yang utama berupa padi. Produksi padi yang tinggi di daerah ini didukung oleh pola tanam dan sebagian menggunakan irigasi teknis atau irigasi pedesaan.

Keberadaan sumber daya alam pesisir dan laut ini dimanfaatkan masyarakat pesisir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hasil tangkap ikan diperdagangkan dalam kondisi segar dan dalam bentuk olahan. Olahan yang

¹⁵ Weri “profil pembangunan Aceh Barat Daya”, Blangpidie: BAPPEDA Aceh Barat Daya), Agustus 2016, hlm 62.

lazim ditemukan ialah ikan asin, ikan teri kering, ikan kayu dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Susoh pada waktu itu merupakan rantai perniagaan di pantai Barat Daya Aceh. Sumber daya kelautan dan perikanan, diharapkan akan mencapai tujuan yang ideal, yakni menyelesaikan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.¹⁶

Selain itu, kegiatan perikanan tangkap juga memunculkan beberapa peluang kegiatan lainnya sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat pesisir di Kecamatan Susoh. Kegiatan tersebut diantaranya adalah industri pemasaran ikan segar, pemasaran berbagai macam ikan asin, pabrik es, industri kapal ikan, industri alat penangkapan ikan, dan minyak ikan Hiu, yang dihasilkan dari hati ikan Hiu untuk ekspor keluar daerah. Minyak ikan Hiu digunakan untuk berbagai olahan seperti obat-obatan, parfum dan lain-lain. Akan tetapi kegiatan tersebut juga mampu menciptakan peluang kerja bagi sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk bekerja di bidang tersebut.¹⁷

Tabel 4. 5
Karakteristik Desa di Kecamatan Susoh Tahun 2020

Desa	Status	Kriteria	Kemampuan
1	2	3	4
001 Kedai Susoh	Desa	Miskin	Swakarya
002 Panjang Baru	Desa	Bukan Miskin	Swasembada

¹⁶ Razali, *Selayang Pandang*. Cetakan pertama, (Banda Aceh: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2011), hlm. 54.

¹⁷ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

003 Kedai Palak Kerambil	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
004 Ladang	Desa	Miskin	Swakarya
005 Padang Panjang	Desa	Miskin	Swakarya
006 Rubek Meupayong	Desa	Miskin	Swakarya
007 Cot Mancang	Desa	Miskin	Swakarya
008 Lampoh Drien	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
009 Meunasah	Desa	Miskin	Swakarya
010 Blang Dalam	Desa	Miskin	Swakarya
011 Palak Hulu	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
012 Palak Hilir	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
013 Rumah Dua Lapis	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
014 Durian Jangek	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
015 Baharu	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
016 Pinang	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
017 Rumah Panjang	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
018 Padang Baru	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
019 Pulau Kayu	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
020 Ujung Padang	Desa	Miskin	Swakarya
021 Pawoh	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
022 Barat	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
023 Durian Rampak	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
024 Pantai Perak	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
025 Padang Hilir	Desa	Bukan Miskin	Swasembada

026 Gadang	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
027 Tangah	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
028 Kepala Bandar	Desa	Bukan Miskin	Swasembada
029 Geulima Jaya	Desa	Miskin	Swakarya

4.1.3 Budaya dan Karakter Masyarakat Susoh

Budaya adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia. Seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Hasil akal budi dari alam sekeliling dan dipergunakan bagi kesejahteraan hidupnya.

Karena itu pemahaman adat dan budaya Aceh punya nilai khusus atau istimewa, karena berkaitan dengan adat. Pemahaman adat dalam masyarakat Aceh adalah merujuk kepada ajaran agama, seperti halnya budaya di Kecamatan Susoh. Kecamatan Susoh dikenal dengan suku *aneuk jamee*, *aneuk jamee* ini merupakan sebuah suku yang tersebar di sepanjang pesisir Barat Aceh. Dari segi bahasa, *aneuk jamee* diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari tanah Minang, orang Aceh menyebut mereka sebagai *aneuk jamee* yang berarti tamu dan pendatang. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Padang melainkan bahasa *jamee* tetapi ada juga sebagian yang menggunakan bahasa Aceh dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya di kecamatan Susoh juga masih sangat kental dengan budaya gotong royongnya dan sudah menjadi kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan membersihkan masjid dan yang paling sering dilakukan dan dapat dilihat hampir setiap hari adalah kekompakan nelayan dalam membantu sesama nelayan dalam mendorong perahu dari perairan menuju daratan.

Masyarakat Susoh pada umumnya menghormati dan menaati hukum adat, karena menaati hukum sama dengan menghargai diri sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu menghormati adat merupakan suatu keharusan yang jika tidak demikian akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu adat.¹⁸

Masyarakat Susoh masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan sangat menjunjung kekompakan, dimana setiap masyarakat sangat berpartisipasi dalam melakukan segala hal, masyarakat Susoh sangat antusias dalam melaksanakan hal-hal yang dilakukan bersama, nuansa persaudaraan masih sangat kental dan bersahaja.

4.2 Kebijakan Vaksinasi di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya: Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan

Salah satu program yang diupayakan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit ini adalah vaksinasi. Pemerintah memiliki peranan penting dalam penanganan wabah Covid-19. Pemerintah memiliki tanggung

¹⁸ Razali, *Selayang Pandang*. Cetakan pertama, (Banda Aceh: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2011), hlm. 104.

jawab yang besar dan menjadi garda terdepan dalam menangani Covid-19 termasuk juga dalam proses pelaksanaan vaksinasi.

Dalam Faktor penyebab terjadinya penolakan penulis dapat mengaitkan dengan teori faktor penyebab terjadinya konflik. Untuk membahas teori faktor penyebab konflik peneliti menggunakan analisis *Structural*, *Accellerator* dan *Trigger* (SAT) dimana Ichsan Malik membagi faktor konflik menjadi tiga bagian yaitu struktural, akselerator, serta pemicu konflik/*trigger*.

- **Struktural (Sumber konflik)**

Permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan pematik utama yang mendorong orang untuk protes dan melakukan kekerasan. Seperti yang terjadi di PPI Susoh, Aceh Barat Daya, dimana terdapat kerusuhan dari program vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah di sekitaran kompleks PPI Ujung Serangga. Hal ini juga dijelaskan oleh muzakir sebagai salah satu panglima laot, ia mengatakan bahwa:

*Banyak muge tidak berani masuk untuk membeli ikan karena takut ditahan KTP dan dipaksa vaksin, sehingga hal ini memicu muge dan nelayan untuk melakukan perlawanan.*¹⁹

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa alasan muge dan nelayan melakukan perlawanan karena banyak masyarakat yang takut untuk memasuki kawasan PPI dan hal ini tentu saja menyebabkan berkurangnya konsumen untuk membeli ikan dari hasil tangkapan mereka dan hal juga berpengaruh pada pendapatan sehari-hari.

¹⁹ Wawancara dengan Muzakir sebagai panglima laot pada tanggal 27 November 2022

- **Akselerator (Faktor Mempercepat)**

Banyak alasan lain yang membuat masyarakat berhak untuk tidak ikut program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh para muge dan nelayan di Aceh Barat Daya. Akselerator permasalahan ini adalah, nelayan menganggap bahwa adanya penahanan KTP yang dilakukan oleh petugas vaksinasi. Hal ini diungkapkan oleh Muzakir, bahwa:

Memang benar adanya penahanan KTP dan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya perlawanan. Perlawanan dilakukan oleh muge karna pintu keluar dari komplek PPI Ujung Serangga ditutup, sehingga muge takut untuk keluar dengan bebas.²⁰

Para muge dan nelayan menganggap bahwa penahanan KTP serta penutupan jalan keluar sangat mengganggu kegiatan mereka, muge dan nelayan berpendapat bahwa akibat dari penutupan jalan keluar tersebut dapat membuat mereka dan masyarakat takut untuk memasuki area PPI karena takut akan divaksin, dan juga masyarakat merasa penahanan KTP merupakan suatu pemaksaan yang dilakukan oleh petugas. Hal ini disampaikan oleh muzakir:

Banyak muge tidak berani masuk untuk membeli ikan karena takut ditahan KTP dan dipaksa vaksin, sehingga hal ini memicu muge dan nelayan untuk melakukan perlawanan.²¹

²⁰ Wawancara dengan Muzakir sebagai panglima laot pada tanggal 27 November 2022

²¹ *Ibid*

Namun, pemaksaan yang dibicarakan oleh muge dan nelayan mendapat bantahan dari pihak kapolsek Susoh, bapak Barnawi menyampaikan bahwa:

Memang kita berdiri di jalan keluar sehingga mereka berfikir menghambat jalan keluar dan merasa kami menutup jalan, memaksa mereka. Masalah penahanan KTP, sebenarnya memang yang mau untuk di vaksin harus menyerahkan KTP sebagaimana syarat untuk di vaksin. Jadi yang lain berfikir adanya penahanan KTP padahal tidak, yang tidak mau di vaksin padahal bisa keluar karena tidak adanya paksaan sama sekali untuk di vaksin, sukarela saja yang mau untuk di vaksin.²²

Dari sini dijelaskan bahwa terjadinya kesalahpahaman antara muge dengan petugas vaksinasi, di mana para muge menganggap adanya penahanan KTP yang dilakukan oleh petugas padahal tidak ada sama sekali, yang ada hanyalah penyerahan KTP sebagai syarat untuk di vaksin. Akibat dari kesalahpahaman ini banyak muge, nelayan, serta masyarakat takut untuk memasuki PPI karena takut untuk di vaksin.

- **Pemicu Konflik**

Kerusuhan yang dilakukan oleh para nelayan dan muge adalah kerusuhan yang terjadi begitu saja dan tidak terkoordinasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang nelayan yang sekaligus panglima laot yang bernama Muzakir, bahwa:

²² Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

*“Memang tidak ada yang mengetuai dan tidak ada rencana, Cuma ada kesepakatan yang secara spontan yang dilakukan oleh muge, sehingga memicu untuk terjadinya perlawanan”.*²³

Kronologi kerusuhan yang terjadi merupakan kerusuhan yang tidak terkoordinasi dan terjadi secara spontan, karena tidak adanya rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh muge. Aksi yang tidak terencana itu terjadi pada hari ketiga pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Pihak keamanan yang sedang bertugas pada saat program vaksinasi Covid 19 di PPI Ujung Serangga Susoh juga membenarkan hal tersebut. Dalam hal ini Barnawi yang selaku Kapolsek Susoh mengatakan bahwa:

*Awalnya muge dan nelayan hanya melakukan aksi demonstrasi dan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, namun seiring aksi berlangsung orang-orang yang ada di belakang ikut-ikutan untuk melakukan aksi tersebut, sehingga massa terlihat ramai. Akibat dari aksi yang ikut-ikutan membuat keadaan semakin anarkis, ada yang melempar kursi serta meja sehingga membuat keadaan semakin kacau, dari sebagian muge dan nelayan merasa keberatan untuk di vaksin dan lainnya pun ikut terprovokasi dan tiba-tiba secara spontan terjadilah hal tersebut.*²⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa faktor pemicu yang muncul tiba-tiba dalam kejadian kerusuhan ini adalah adanya aksi orang-orang

²³ Wawancara dengan Muzakir sebagai panglima laot pada tanggal 27 November 2022

²⁴ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

yang ikutan yang membuat keadaan semakin anarkis dan tidak dapat terkendalikan, sehingga membuat suasana yang mulanya hanya sebagai aksi demonstrasi berubah menjadi aksi yang kacau.

4.2.1 Implementasi Kebijakan Vaksinasi di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Pemerintah di Kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan vaksinasi. Dalam rangka melihat bagaimana implementasi kebijakan di Kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya perlu dilihat dari segi komunikasi. Komunikasi adalah salah satu alat dalam penyampaian kebijakan dengan memberikan informasi yang tepat kepada pelaksana kebijakan atau kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan sehingga dengan begitu kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat. Dalam komunikasi terdapat tiga faktor yang mempengaruhi informasi diantaranya yaitu: 1) penyaluran komunikasi yang baik, 2) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti, 3) informasi implementasi kebijakan harus jelas dan sesuai dengan pelaksanaan awal serta konsisten terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.

Komunikasi adalah salah satu variabel untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang diinginkan. Sasaran kebijakan harus diberikan informasi mengenai kebijakan yang akan ditetapkan. Masyarakat harus mendapat informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerimaan informasi. Dalam melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat, pemerintah bekerja sama

dengan semua unsur yang terlibat sebagai implementor kebijakan sehingga penyampaian informasi selaras dengan kebijakan yang ditetapkan.

Kepmenkes No. 10 Tahun 2021 dalam pasal 41 Bab 8 ayat 1 mengenai strategi komunikasi vaksinasi untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat terhadap vaksin dengan strategi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang vaksinasi Covid-19, merekomendasikan agar masyarakat dibekali dengan informasi yang tepat, didorong untuk meningkatkan partisipasi dalam vaksinasi Covid-19 dan ini harus melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tenaga kesehatan.

Pemerintah dan implementor kebijakan berusaha menyakinkan masyarakat dengan berbagai cara salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi yang dipakai harus dapat menyakinkan masyarakat dan membuat masyarakat tertarik untuk divaksinasi. Informasi mengenai pentingnya vaksinasi Covid-19 juga selalu diberikan kepada masyarakat Kecamatan Susoh dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung seperti yang disampaikan oleh Bapak zulfan selaku mantan camat kecamatan Susoh:

Kalau tentang vaksin, bapak sebagai seorang pemerintah dan juga ini merupakan program dari pemerintah pusat mengenai masalah penularan virus Covid-19, jadi sebagai seorang pemerintah harus mensukseskan kebijakan ini. Kecamatan Susoh sudah melakukan berbagai cara dalam sosialisasi vaksinasi, sosialisasi yang dilakukan diantaranya adalah pemasangan spanduk,

membagikan informasi melalui media sosial serta turun langsung ke lapangan dan mensosialisasikan di 5 mukim yang ada di Kecamatan Susoh.²⁵

Komunikasi secara langsung, seperti mensosialisasikan langsung di lima mungkin yang terdapat di Kecamatan Susoh dan komunikasi secara tidak langsung seperti pemasangan spanduk, serta memberikan informasi melalui media sosial. Dalam sosialisasi tersebut pemerintah Kecamatan menyampaikan tentang pentingnya vaksinasi, serta menghimbaukan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir atau takut untuk menerima vaksinasi Covid-19, karena itu merupakan bentuk pemutusan penyebaran Covid-19.

Tujuan dari sosialisasi vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah agar masyarakat paham tentang pentingnya vaksinasi Covid-19. Meskipun pemerintah Susoh sudah melakukan berbagai upaya dalam menyukseskan vaksin tidak sedikit masyarakat yang masih kurang paham serta kontra dengan vaksin itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, penolakan ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang vaksinasi.

Tidak hanya berita hoax, penolakan yang dilakukan oleh muge dan nelayan juga disebabkan karena adanya muge dari luar Aceh Barat Daya yang tidak mendapatkan informasi terkait pentingnya vaksinasi dan adanya kegiatan vaksinasi yang dilakukan di PPI dan juga karena kurangnya informasi dan edukasi

²⁵ Wawancara dengan Zulfan selaku mantan Kecamatan Susoh pada tanggal 16 Desember 2022

tentang vaksinasi tersebut maka terjadilah aksi penolakan dari para muge dan nelayan. Barnawi menjelaskan bahwa:

Kita sudah menyampaikan kepada masyarakat di desa khususnya masyarakat yang ada di PPI tentang program vaksin pemerintah, untuk apa vaksin tersebut, kebutuhan vaksin, untuk masyarakat khusus di situ tidak apa-apa, ini mungkin yang bermasalah sedikit masyarakat dari luar, khusus dari muge sebenarnya. Ada muge dari Nagan Raya, Tapaktuan, dan Labuhanhaji. Jadi mungkin informasinya tidak sampai ke mereka dan mungkin ada miskomunikasi hingga sebagian masyarakat ada yang terprovokasi sehingga dengan spontan membuat keributan.²⁶

Pihak aparat keamanan yang bertugas di PPI sudah melakukan sosialisasi dan penyampaian terlebih dahulu kepada masyarakat yang ada di pekarangan PPI termasuk nelayan, muge dan juga penjual ikan tentang akan diadakannya program vaksinasi dan pada saat pemberitahuan itu juga masyarakat yang ada pada saat itu setuju dengan adanya program tersebut. Namun yang terjadi adalah pemberitahuan tersebut tidak menyeluruh terkhususnya bagi para muge yang berasal dari luar Aceh Barat Daya. Burnawi selaku Kapolsek Susoh menambahkan, bahwa:

Kenapa menolak? Karena sebelumnya kekurangan informasi, ketidaktahuan masyarakat dan masyarakat banyak dengar berita luar atau berita

²⁶ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

*hoax. Sehingga masyarakat mengambil kesimpulan sendiri tentang banyaknya bahaya vaksinasi.*²⁷

Seperti yang diketahui bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi di Indonesia masih sangat rendah, salah satu penyebab yakni disinformasi

Berita bohong (hoax) memang sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat, apalagi masyarakat awam yang menelan mentah-mentah terkait berita yang ada di internet maupun berita yang berputar di masyarakat tanpa mencari terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut.

Selain komunikasi, sumber daya juga merupakan salah satu faktor pendorong dalam menyukseskan implementasi kebijakan. Dalam hal sumber daya ada beberapa kriteria yang harus dimiliki yaitu: 1) sumber daya manusia yang akan menjalankan kebijakan haruslah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan kebijakan yang akan dijalankan. 2) wewenang yang dimiliki sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan yang telah diamanatkan. 3) sarana dan prasarana yang tersedia dalam menjalankan kebijakan yang digunakan untuk mendukung secara langsung agar kebijakan dapat terlaksana dengan semestinya.

PERPRES No. 33 Tahun 2022 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 menyebutkan bahwa sarana dan prasarana seperti vaksin dan alat suntik ditanggung oleh APBN, jadi

²⁷ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 tanpa terkecuali. SDM yang mumpuni akan membuat implementasi berjalan dengan lancar dan jumlah personil yang dikerahkan haruslah memadai. Kapolsek Susoh melakukan upaya dalam implementasi kebijakan vaksinasi seperti yang disampaikan oleh Burnawi sebagai Kapolsek Susoh:

Kapolsek Susoh dan personil lainnya dikerahkan dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19 dengan turun langsung dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengadakan tempat terhadap vaksinasi Covid-19 di wilayah Kecamatan Sosoh, seperti pengadaan tempat vaksinasi di meunasah atau pun lapangan yang ada di gampong-gampong yang berada dalam kawasan kecamatan Sosoh.²⁸

Dalam hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah melibatkan seluruh kalangan salah satunya ialah Kapolsek Susoh yang ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan vaksin Covid-19.

Dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19, implementor dikerahkan dari berbagai sektor pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19, baik dalam tingkat daerah, Kecamatan, Gampong, dan juga seluruh petugas kesehatan, baik Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, serta klinik-klinik di daerah Kecamatan Sosoh dan TN/POLRI yang berkompeten dan terlatih juga ikut serta dalam menjalankan kebijakan tersebut.

²⁸ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

4.2.2 Pemetaan Struktural dalam Implementasi Kebijakan Vaksin: stakeholder Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Untuk mengatasi masalah vaksinasi di Kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya perlu dilihat bagaimana pemetaan *Stakeholder* yang ada di kecamatan Susoh itu sendiri. Guna melihat bagaimana pemetaan tersebut maka dapat dilakukan dengan cara melihat karakteristik yang melekat pada *stakeholder*. Karakteristik untuk memetakan *stakeholder* yang dapat digunakan diantaranya adalah kemungkinan partisipasi dan aksi yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam mengatasi masalah kebijakan vaksinasi.

Karakter yang dimiliki oleh implementor adalah tanggung jawab, kejujuran, komitmen, serta sikap profesional. Sikap tanggung jawab, kejujuran, komitmen, serta sikap profesional diharapkan mendapatkan dan juga meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan menurunkan resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut.

Sikap dan tanggung jawab merupakan salah satu hal terpenting dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19. Dalam implementasi kebijakan vaksinasi ini masyarakat memerlukan contoh dari pemerintah itu sendiri. Bila pemerintah dan *Stakeholder* serta tenaga Kesehatan sudah melakukan vaksinasi diharapkan agar masyarakat juga bergerak untuk melakukan vaksin. Oleh karena itu pemerintah juga melakukan strategi pemberian sembako yang diharapkan dapat menjadi pendongkrak tingkat vaksinasi Covid-19 di kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zulfan sebagai mantan camat kecamatan Susoh:

Stakeholder menjadi yang pertama untuk divaksin agar menjadi contoh untuk masyarakat sehingga masyarakat juga bisa tergerak untuk ikut divaksin. Sebenarnya tim medis bukan langsung menyuntikkan, tetapi ada beberapa tahapan dan pemeriksaan yang dilakukan sebelum melakukan vaksin. Termasuk bapak dulu pernah juga gitu, bapak ada Riwayat diabetes mellitus ga di suntik, tetapi dikasih obat dulu diabetes mellitus sudah berkurang baru di suntik. Jadi bukanlah semata-mata datang langsung disuntik, tidak. Sehingga saya bisa meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu takut karena akan adanya pemeriksaan terlebih dahulu.²⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemerintah telah mengambil sikap dengan cara memberikan contoh untuk masyarakat sehingga dengan harapan dapat menghilangkan keraguan masyarakat untuk ikut melakukan vaksinasi Covid-19.

Selain menjadikan pemerintah sebagai contoh untuk meyakinkan masyarakat dalam vaksinasi Covid-19 dan menghilangkan keraguan masyarakat, pemerintah juga melakukan segala strategi politik untuk meningkatkan vaksinasi Covid-19 dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pembagian bantuan sosial. Hal ini tentu saja disambut dengan antusias oleh masyarakat. Apalagi mengingat pada masa pandemi masyarakat cenderung tidak bekerja sehingga menyebabkan penghasilan menurun. Pembagian sembako menjadi salah

²⁹ Wawancara melalui via telepon dengan Zulfan selaku mantan Kecamatan Susoh pada tanggal 16 Desember 2022

satu langkah upaya yang dilakukan, seperti yang di lakukan oleh Bapak Barnawi selaku Kapolsek Susoh:

Petugas vaksinasi memberi bingkisan berupa sembako kepada muge dan nelayan yang bersedia untuk di vaksin sebagai bentuk sarana kontak.³⁰

Dengan begitu data dikatakan bahwa Kapolsek Susoh juga mempunyai strategi alternatif sehingga tidak bersifat memaksa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.2.3 Faktor Struktural pada Kerusakan Akibat Vaksinasi di Kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya

Faktor struktural sangat mempengaruhi kerusakan sosial dan hal ini dapat dibahas pada empat isu yang terkait yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi, kapasitas organisasi, represi, dan difusi.

a. Motivasi

Motivasi merupakan salah satu faktor struktural pada kerusakan sosial. Sederhananya motivasi dapat diartikan sebagai alasan seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam suatu keadaan. Selain faktor ekonomi, faktor penahanan KTP juga berpengaruh pada kejadian tersebut.

Muge dan nelayan menganggap bahwa penahanan KTP yang dilakukan oleh petugas merupakan suatu pemaksaan. Namun, pemaksaan yang dibicarakan oleh muge dan nelayan mendapat bantahan dari pihak Kapolsek Susoh, bapak Barnawi menyampaikan bahwa:

³⁰ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

Memang kita berdiri di jalan keluar sehingga mereka berfikir menghambat jalan keluar dan merasa kami menutup jalan, memaksa mereka. Masalah penahanan KTP, sebenarnya memang yang mau untuk di vaksin harus menyerahkan KTP sebagaimana syarat untuk di vaksin. Jadi yang lain berfikir adanya penahanan KTP padahal tidak, yang tidak mau di vaksin padahal bisa keluar karena tidak adanya paksaan sama sekali untuk di vaksin, sukarela saja yang mau untuk di vaksin.³¹

Dari sini dijelaskan bahwa terjadinya kesalahpahaman antara muge dengan petugas vaksinasi, di mana para muge menganggap adanya penahanan KTP yang dilakukan oleh petugas padahal tidak ada sama sekali, yang ada hanyalah penyerahan KTP sebagai syarat untuk di vaksin. Akibat dari kesalahpahaman ini banyak muge, nelayan, serta masyarakat takut untuk memasuki PPI karena takut untuk di vaksin.

b. Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi dapat dilihat dari jumlah individu yang berpartisipasi dan juga adanya pemimpin dari organisasi tertentu. Faktor struktural yang terkait dengan organisasi ini juga dapat ditafsirkan sebagai gagasan bahwa kerusuhan terjadi secara spontan.

Kerusuhan yang dilakukan oleh para nelayan dan muge adalah kerusuhan yang terjadi begitu saja dan tidak terkoordinasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang nelayan yang sekaligus panglima laot yang bernama Muzakir, bahwa:

³¹ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

*“Memang tidak ada yang mengetuai dan tidak ada rencana, Cuma ada kesepakatan yang secara spontan yang dilakukan oleh muge, sehingga memicu untuk terjadinya perlawanan”.*³²

Kronologi kerusuhan yang terjadi merupakan kerusuhan yang tidak terkoordinasi dan terjadi secara spontan, karena tidak adanya rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh muge. Aksi yang tidak terencana itu terjadi pada hari ketiga pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Pihak keamanan yang sedang bertugas pada saat program vaksinasi Covid 19 di PPI Ujung Serangga Susoh juga membenarkan hal tersebut. Dalam hal ini Barnawi yang selaku Kapolsek Susoh mengatakan bahwa:

*Awalnya muge dan nelayan hanya melakukan aksi demonstrasi dan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, namun seiring aksi berlangsung orang-orang yang ada di belakang ikut-ikutan untuk melakukan aksi tersebut, sehingga massa terlihat ramai. Akibat dari aksi yang ikut-ikutan membuat keadaan semakin anarkis, ada yang melempar kursi serta meja sehingga membuat keadaan semakin kacau, dari sebagian muge dan nelayan merasa keberatan untuk di vaksin dan lainnya pun ikut terprovokasi dan tiba-tiba secara spontan terjadilah hal tersebut.*³³

Sebenarnya aksi demonstrasi sah-sah saja dilakukan, bahkan demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur

³² Wawancara dengan Muzakir sebagai panglima laot pada tanggal 27 November 2022

³³ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

tentang demonstrasi adalah undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum.³⁴ Demonstrasi juga merupakan sebagai perwujudan dari masyarakat dalam berbicara dan merupakan suatu kebebasan berekspresi. Demonstrasi baik dilakukan asalkan sesuai dengan aturan mainnya, demonstrasi tidak boleh mengganggu dan merugikan orang lain. Demonstrasi yang baik tentu tidak boleh anarkis dengan membuat keributan dan pengrusakan.

Demonstrasi bisa saja dilakukan dengan seharusnya jika para nelayan dan muge tidak mudah terprovokasi yang akhirnya bukan hanya merugikan secara fisik tapi juga merugikan secara materi. Terhitung tidak hanya meja dan kursi tetapi juga sejumlah alat medis dan dokumen serta seorang petugas yang mengalami luka lebam akibat terkena benturan kursi plastik.

c. Represi

Represi adalah ancaman hukuman yang dapat mencegah individu atau kelompok untuk ikut berpartisipasi. Dengan kata lain represi dapat menghalangi kerusuhan yang akan terjadi, namun yang perlu diketahui adalah represi bisa dengan mudah mencegah atau bahkan meningkatkan kerusuhan.

Seperti yang disampaikan oleh Muzakir sebagai salah satu panglima laot, mengatakan bahwa:

³⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998> diakses pada jam 16.14 tanggal 16 juni 2023

Masyarakat sudah mengetahui akan adanya sanksi yang didapatkan jika melanggar kebijakan dari pemerintah tentang vaksin tersebut. Namun, karena faktor pendapatan yang berkurang, muge dan nelayan melanggar aturan dari pemerintah.³⁵

Dari hasil wawancara diatas muge dan nelayan terpaksa melakukan aksi demonstrasi karena penurunan pendapatan yang mereka rasakan. Muzakir selaku panglima laot menambahkan bahwa:

Tidak ada yang ditangkap atas kejadian tersebut, tetapi hanya ada pemanggilan setelah demo itu, pada saat pemanggilan tersebut polisi menanyakan “siapa yang mengetuai dalam aksi tersebut” tidak ada yang mengetuai. Ada beberapa yang mendapatkan pemanggilan dari Polres tetapi tidak ditangkap dan dilepaskan karena memang tidak ada yang mengetuai aksi tersebut.³⁶

Setelah terjadinya kerusuhan tersebut, tiga hari setelahnya ada beberapa orang yang dipanggil ke Polres Aceh Barat Daya untuk dimintai keterangan. Barnawi sebagai Kapolsek Susoh menjelaskan, bahwa:

Memang ada beberapa orang yang dipanggil ke Polres untuk diselesaikan secara kekeluargaan, untuk muge tidak ada yang dipanggil ke Polres karena kejadiannya beramai-ramai dan terjadi secara spontan, hanya beberapa orang saja yang dapat panggilan diantaranya toke bot dan toke bangku. Hanya mereka

³⁵ Wawancara dengan Muzakir sebagai panglima laot pada tanggal 27 November 2022

³⁶ *ibid*

saja yang dibawa ke Polres, alasan toke-toke saja yang dibawa karena para muge bekerja dibawah naungan toke-toke tersebut. Penyelesaiannya adalah mereka dipanggil ke Polres, karena kesalahpahaman tersebut, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut hanya saja beberapa fasilitas seperti meja, kursi, dokumen serta alat medis yang ada di lokasi rusak. Polisi menindaklanjuti kejadian langsung pada hari itu juga, namun perdamaian dan penyelesaian tidak terjadi di hari tersebut, polisi hanya memproses dengan pertanyaan-pertanyaan. Tiga hari setelah kejadian baru diadakan duduk bersama yang dilakukan bersama kapolres, Kasat Reskrim, Kapolsek serta toke-toke yang mendapat panggilan dari kejadian tersebut, dan dari panggilan itu diambil tindakan secara kekeluargaan dan perdamaian.³⁷

Kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak adanya sanksi yang didapatkan oleh para muge dan nelayan karena miskomunikasi dan tidak adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan akhirnya masalah selesai.

d. Difusi

Faktor struktural tentang difusi ini dapat diartikan bahwa kondisi di lokasi lain yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kerusuhan akibat dari lokasi tersebut. Artinya difusi mendapatkan pengaruh dari suatu kejadian.

Barnawi selaku Kapolsek Susoh mengatakan bahwa:

³⁷ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

*Daerah di sekitaran Susoh tidak pernah terjadi kerusuhan. Namun kalau untuk komplain-komplain biasa itu pernah terjadi, tetapi tidak sampai terjadinya kerusuhan yang merugikan secara materi maupun non materi.*³⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa difusi tidak mempengaruhi terjadinya kerusuhan yang terjadi di PPI Ujong Serangga, karena sebelumnya tidak pernah terjadi kerusuhan di sekitaran Kecamatan Susoh maupun di wilayah Kecamatan Susoh sendiri.

Barnawi juga menambahkan bahwa:

*Kericuhan yang terjadi di PPI Ujong Serangga Susoh adalah kericuhan yang pertama sekali terjadi di Kecamatan Susoh. Kalau memang sebelumnya ada atau pernah terjadi kejadian yang sama, polisi sudah pasti akan mempertimbangkan efek dari kebijakan kegiatan vaksinasi Covid-19 di PPI Ujong Serangga. Polisi bahkan tidak menduga akan ada terjadinya penolakan vaksinasi dari para muge.*³⁹

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Kapolsek Susoh dapat mempertimbangkan efek ataupun dampak yang akan dihadapi oleh para petugas dari kegiatan kebijakan vaksinasi Covid-19 di PPI Ujong Serangga, jika sebelumnya pernah terjadi kericuhan yang sama di wilayah tersebut.

³⁸ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

³⁹ *ibid*

4.3 Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah

Penyebaran wabah Covid-19 ini telah memukul kondisi ekonomi masyarakat. Hal tersebut kemudian menjalar sehingga menyebabkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat.

Lembaga riset dari United Nations University-WIDER memperkirakan bahwa Covid-19 dapat mengakibatkan angka kemiskinan global sehingga mencapai 500 juta orang di seluruh penjuru dunia atau sekitar 8% dari total populasi umat manusia.⁴⁰ Data yang dikumpulkan oleh lembaga tersebut menunjukkan bahwa saat ini adalah pertama kalinya angka kemiskinan global meningkat pesat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

Beralih ke Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa wabah Covid-19 dapat mengakibatkan hingga 3.78 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan dan 5,2 juta orang kehilangan pekerjaan. Dalam skenario yang lebih 'optimis', Sri Mulyani memperkirakan terdapat 1,1 juta orang yang jatuh dalam kemiskinan sementara 2.9 juta orang kehilangan pekerjaan.

Penurunan pendapatan dari unsur-unsur masyarakat tersebut akan menciptakan lapisan masyarakat yang sangat rentan terkena dampak Covid-19, baik secara medis, ekonomi, maupun sosial. Mereka yang tergolong dalam ekonomi lemah, berbeda dengan para pekerja kerah putih dimana tidak mampu sepenuhnya menjalankan *social distancing* karena harus terus bekerja. Akhirnya, mereka menjadi pihak yang paling berpotensi terpapar virus Covid-19. Disisi lain,

⁴⁰ Andy Sumner, Eduardo Ortiz-Juárez, Chris Hoy, UNU-WINDER, 2020.

pemerintah pun terkesan kalang kabut dalam mempersiapkan program pengaman sosial yang memadai untuk masyarakat dengan ekonomi rawan. Jika situasi ini terus berlangsung, kemungkinan rasa frustrasi dari masyarakat akan terakumulasi menjadi kekecewaan yang dapat meledak menjadi konflik sosial.

Terdapat dampak yang terjadi pasca kerusuhan tersebut banyak alat-alat medis yang rusak. Muzakkir menjelaskan, bahwa:

Kerusuhan tidak lama terjadi, cuma sebentar saja, tetapi semua barang-barang hancur, baik barang-barang yang di meja dan bahkan meja itu sendiri hancur. Bahkan nelayan ada yang mencoba mendekati mobil ambulans tetapi ditahan oleh Ruslan (petugas kesehatan) agar tidak menabrak dan mengambil obat-obatan yang ada di dalam mobil ambulans.⁴¹

Barnawi juga menjelaskan bahwa:

Sasarannya bukan aparat keamanan bukan polisi tetapi sasarannya program tersebut, seperti obat-obatan.⁴²

Dari sini dijelaskan bahwa dampak dari kerusuhan tersebut sangat merugikan terutama kerusakan fisik. Kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak adanya sanksi yang didapatkan oleh para muge dan nelayan karena miskomunikasi dan tidak adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan akhirnya masalah selesai.

⁴¹ Wawancara dengan Muzakir sebagai panglima laot pada tanggal 27 November 2022

⁴² Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

Dengan adanya kejadian tersebut, Kapolsek Susoh lebih meningkatkan dan semakin melakukan sosialisasi yang lebih mendalam serta merata kepada semua masyarakat yang ada di PPI Ujong serangga, Susoh. Barnawi sebagai Kapolsek Susoh mengatakan bahwa:

Terakhir kita kukuhkan lagi masyarakat di PPI termasuk orang luar dan kita juga memberikan pemahaman lagi, sehingga pada akhirnya masyarakat luar juga mau untuk ikut serta vaksin Covid-19.⁴³

Dampak dari kejadian tersebut adalah polisi semakin memberikan penyuluhan secara mendalam kepada masyarakat. Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masyarakat yang dibawa ke kantor polisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan. Karena sebelumnya banyak muge dari luar Aceh Barat Daya yang datang ke PPI, sehingga penyuluhan yang dilakukan sebelumnya oleh polisi tidak tersampaikan secara merata, sehingga terjadinya miskomunikasi.

Selain melakukan sosialisasi yang lebih mendalam dan merata, Kapolsek Susoh juga mempunyai strategi alternatif sehingga tidak bersifat memaksa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh Barnawi tersebut adalah:

Petugas vaksinasi memberi bingkisan berupa sembako kepada muge dan nelayan yang bersedia untuk di vaksin sebagai bentuk sarana kontak.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

⁴⁴ Wawancara dengan Barnawi S.E selaku Kapolsek Susoh pada tanggal 19 Januari 2023

Setelah 5 hari pasca kejadian dan pemanggilan dari kepolisian, polisi memberikan sosialisasi, edukasi yang lebih mendalam sehingga program vaksinasi dapat kembali dilanjutkan di tempat yang sama. Polisi kembali merangkul muge dan nelayan untuk ikut serta dalam program vaksinasi. Muge dan nelayan yang berada di PPI baik dari luar Aceh Barat Daya maupun lokal sudah tidak takut untuk melakukan vaksin Covid-19, Mereka secara sukarela datang ke posko untuk melakukan vaksin Covid-19. Kapolsek susoh juga memberikan sembako yang berupa beras dan minyak kepada muge dan nelayan yang bersedia untuk di vaksin sebagai bentuk pendekatan yang bersifat tidak memaksa serta sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Zulfan sebagai mantan camat kecamatan Susoh mengatakan bahwa:

*Bapak lebih sering menyampaikan ke lapangan masalah kegunaan vaksin kepada masyarakat, dan bapak bangga karena hampir seluruh masyarakat Susoh sudah melakukan vaksin.*⁴⁵

Setelah melakukan sosialisasi yang mendalam dengan turun langsung ke lapangan, banyak masyarakat Susoh yang dengan sukarela mengikuti kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dampak positif dari kebijakan vaksinasi Covid-19 turut dirasakan oleh masyarakat yang ikut berpartisipasi secara sukarela dalam kebijakan vaksinasi Covid-19 tersebut. Karena program vaksinasi Covid-19 membuat kekebalan tubuh

⁴⁵ Wawancara melalui via telepon dengan Zulfan selaku mantan Kecamatan Susoh pada tanggal 16 Desember 2022

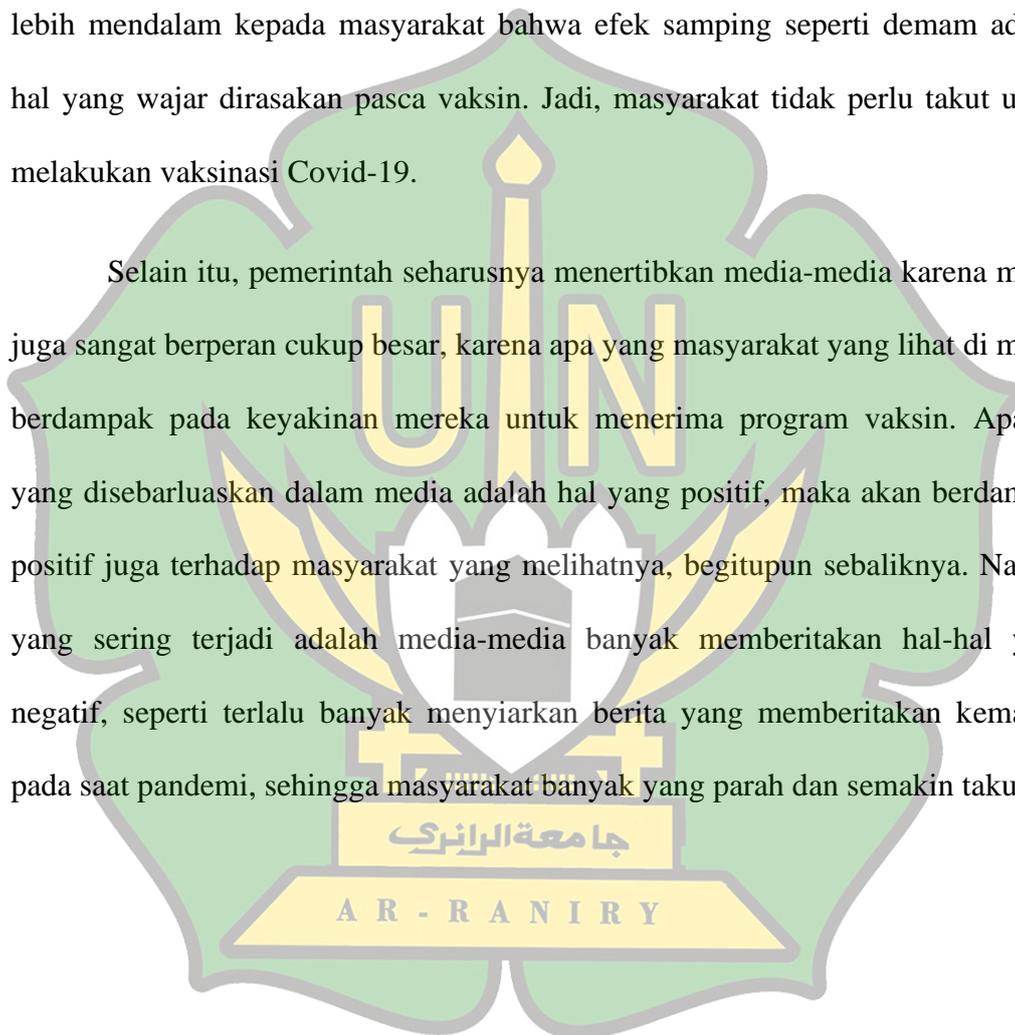
seseorang semakin meningkat sehingga meminimalisir untuk terkena virus Covid-19. Dengan adanya kebijakan ini masyarakat akhirnya bisa kembali merasakan kehidupan seperti sedia kala.

Dengan adanya kerusuhan yang dilakukan oleh muge dan nelayan yang ada di PPI Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan bahwa pemerintah belum cukup baik dalam menerapkan dan menjalankan kebijakan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga kurang gencar dalam menghadapi masyarakat yang memiliki keraguan terhadap vaksinasi Covid-19. Seharusnya sebelum melaksanakan kebijakan vaksinasi Covid-19 pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi, edukasi dan pemberitahuan yang jelas, seperti menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 100% halal, karena tidak sedikit masyarakat yang meragukan kehalalan dari vaksin ini sendiri. Selanjutnya pemerintah menjelaskan keefektifan dari vaksin, hal ini dikarenakan masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa vaksin Covid-19 tidak 100% melindungi seseorang dari infeksi virus corona tetapi hanya memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dari komplikasi akibat Covid-19. Tetapi ada juga masyarakat yang sudah tau bahwa vaksinasi hanya untuk kekebalan tubuh agar meminimalisir tertularnya corona. Namun, dengan begini masyarakat malah menganggap bahwa orang yang sudah melakukan vaksin dengan orang yang belum melakukan vaksin sama saja, karena ujung-ujungnya akan terkena virus corona juga.

Selanjutnya pemerintah menjelaskan bahwa efek samping dari pasca vaksin, namun masyarakat malah ada yang masih tidak mau untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 karena takut akan efek samping dari vaksin itu sendiri.

Masyarakat juga kurang mengetahui bahwa akan ada pengecekan penyakit yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada calon vaksinasi terlebih dahulu sebelum melakukan vaksinasi Covid-19. Maka dari itu pemerintah seharusnya menjelaskan lebih mendalam kepada masyarakat bahwa efek samping seperti demam adalah hal yang wajar dirasakan pasca vaksin. Jadi, masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

Selain itu, pemerintah seharusnya menertibkan media-media karena media juga sangat berperan cukup besar, karena apa yang masyarakat yang lihat di media berdampak pada keyakinan mereka untuk menerima program vaksin. Apabila yang disebarluaskan dalam media adalah hal yang positif, maka akan berdampak positif juga terhadap masyarakat yang melihatnya, begitupun sebaliknya. Namun yang sering terjadi adalah media-media banyak memberitakan hal-hal yang negatif, seperti terlalu banyak menyiarkan berita yang memberitakan kematian pada saat pandemi, sehingga masyarakat banyak yang parah dan semakin takut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah dan implementor kebijakan diantaranya adalah penolakan yang dilakukan nelayan dan muge terkait kebijakan vaksinasi yang dilakukan di PPI Ujung Serangga Susoh. Dalam faktor penyebab terjadinya penolakan dapat dikaitkan dengan teori faktor penyebab terjadinya konflik. Untuk membahas teori faktor penyebab konflik peneliti menggunakan analisis *Structural, Accellerator* dan *Trigger* (SAT) dimana Ichsan Malik membagi faktor konflik menjadi tiga bagian yaitu struktural, akselerator, serta pemicu konflik/*trigger*.

Faktor struktural atau sumber konflik yang terjadi di PPI Ujung Serangga Susoh yaitu permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan pematik utama yang mendorong orang untuk protes dan melakukan kekerasan. Seperti yang terjadi di PPI Susoh, Aceh Barat Daya, dimana terdapat kerusuhan dari program vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah di sekitaran kompleks PPI Ujung Serangga Kabupaten Aceh Barat Daya. Alasan muge dan nelayan melakukan perlawanan karena banyak masyarakat yang takut untuk memasuki kawasan PPI dan hal ini tentu saja menyebabkan berkurangnya konsumen untuk membeli ikan dari hasil tangkapan mereka dan hal juga berpengaruh pada pendapatan sehari-hari.

Akselerator permasalahan ini adalah, nelayan menganggap bahwa adanya penahanan KTP yang dilakukan oleh petugas vaksinasi. Para muge dan nelayan menganggap bahwa penahanan KTP serta penutupan jalan keluar sangat mengganggu kegiatan mereka, muge dan nelayan berpendapat bahwa akibat dari penutupan jalan keluar tersebut dapat membuat mereka dan masyarakat takut untuk memasuki area PPI karena takut akan divaksin, dan juga masyarakat merasa penahanan KTP merupakan suatu pemaksaan yang dilakukan oleh petugas.

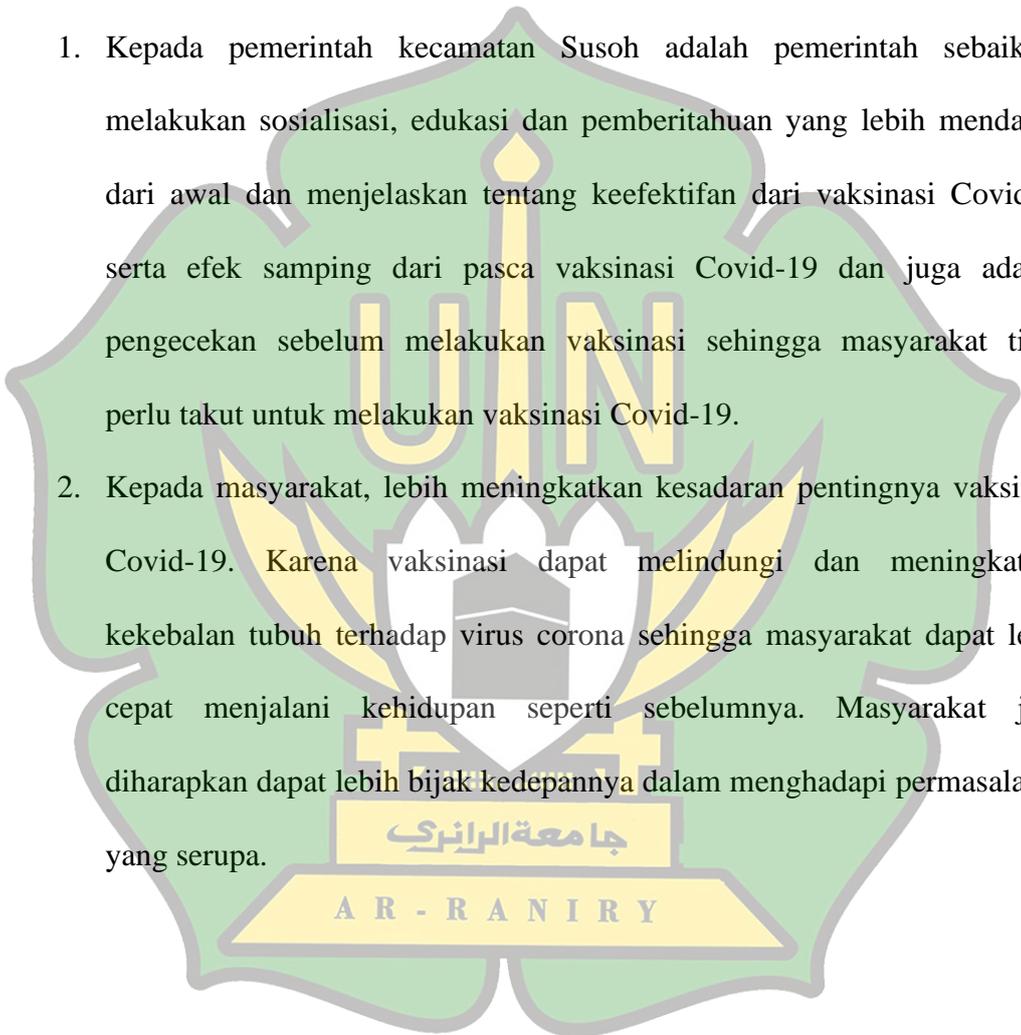
Faktor pemicu yang tiba-tiba dalam kejadian kerusuhan ini adalah adanya aksi orang-orang yang ikutan yang membuat keadaan semakin anarkis dan tidak dapat dikendalikan, sehingga membuat suasana yang mulanya hanya sebagai aksi demonstrasi berubah menjadi aksi yang kacau.



5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan karya ilmiah, yaitu:

1. Kepada pemerintah kecamatan Susoh adalah pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi, edukasi dan pemberitahuan yang lebih mendalam dari awal dan menjelaskan tentang keefektifan dari vaksinasi Covid-19 serta efek samping dari pasca vaksinasi Covid-19 dan juga adanya pengecekan sebelum melakukan vaksinasi sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan vaksinasi Covid-19.
2. Kepada masyarakat, lebih meningkatkan kesadaran pentingnya vaksinasi Covid-19. Karena vaksinasi dapat melindungi dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus corona sehingga masyarakat dapat lebih cepat menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih bijak kedepannya dalam menghadapi permasalahan yang serupa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Aminah. S. roikon 2019. Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ardial, 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Cet I, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Buku Saku Protokol Tatalaksana COVID 19 ED2*. 1-100.
- WJS. Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal: 895.

B. Jurnal dan Skripsi

- Andri Wahyudi, *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*. Hal 13.
- Andy Sumner, Eduardo Ortiz-Juarez, Chris Hoy, 2020, UNU-WINDER.
- Aprinus Salam dan Rina Zuliana. (2022). *Politik Resistensi Dalam Masyarakat Jawa Poskolonial*. Semiotika. Vol 23. Hal 92.
- Baharuddin, T., Sairin, S. S., Qodir, Z., Jubba, H., & Nurmadi, A. (2022). *Partisipasi dan Kepercayaan Sosial Daring: Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia*, Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 6(1), 277-290.
- Indriyanti, Dina. (2021). *Persepsi Petugas Puskesmas Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Era New Normal*. *Jurnal Inspirasi*. 12(1). 29-41.
- Jesika M. P, *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2022.
- Jetri N. R, *Tradisi Khanduri Laot Dalam Keyakinan Teologi Masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2019.
- Leask, H, and (2021). *Jurnal keperawatan*. 13 (September) hal. 569-580
- Lushington, Gerald H (2020). *Perspective On The COVID-19 Coronavirus Outbreak*. *Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening*. 23(2). 90-91.
- Milles, M. B, Huberman, M. dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London; SAGE.

- Matthew B Milles and Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta; UI Press, 1992). Hal. 16.
- Nining, PA, Erlangga, GZN, (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*. 13(3). 569-580.
- Nurhayani, Wisnu H, & Evawami Silitonga. (2021) Analisis Studi Kasus Penolakan Tenaga Kesehatan Terhadap Vaksin Covid-19 di lingkungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*. 7(2).
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Cet II, Kencana, n.d. Jakarta
- Suwandi (last) and Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, n.d. Jakarta.
- Tim Dosen, 2021, *Sosialisasi dan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Upaya Menghentikan Laju Penularan Covid-19 Di Kampus AKBP Padang*, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat. Padang.
- Yusuf Chandra Negara dkk. 2019, *Land Conflict Resolution In Buluspasantren Sub-District, Kebumen District*. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*. Vol 5. Hal 68.

C. Internet

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998> diakses pada jam 16.14 tanggal 16 juni 2023



LAMPIRAN 1

Pertanyaan wawancara

- **Komunikasi dan sumber daya (pemerintah kecamatan Susoh)**

1. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan vaksin Covid-19?
2. Apakah bapak mengetahui tentang penolakan dan perlawanan vaksin Covid-19 yang terjadi di PPI Ujung Serangga?
3. Bagaimana pendapat bapak selaku pemangku kebijakan tentang penolakan dan perlawanan tersebut?
4. Menurut bapak, apa yang menyebabkan nelayan dan muge berpartisipasi dalam kerusuhan tersebut?
5. Apakah bapak menduga akan ada terjadinya penolakan vaksinasi Covid-19 dari nelayan dan muge?
6. Apakah sebelumnya tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh kecamatan?
7. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan Susoh dalam mensosialisasikan praktik vaksin Covid-19?
8. Bagaimana tanggapan bapak jika ada masyarakat yang di vaksin mengalami efek samping pasca vaksin?

- **Diposisi (kapolsek Susoh)**

1. Bagaimana pendapat bapak tentang vaksin Covid-19? Apakah efektif atau tidak?
2. Sebenarnya, bagaimana kronologi kericuhan yang terjadi antara petugas dan nelayan di PPI Ujung Serangga?
3. Apa faktor pendorong kerusuhan tersebut?

4. Lalu, upaya apa yang dilakukan untuk menenangkan kedua belah pihak?
5. Apakah benar adanya penutupan jalan dan penahanan KTP di lokasi kejadian?
6. Apakah bapak menduga akan terjadinya perlawanan dari nelayan terkait vaksinasi Covid-19?
7. Menurut bapak, apa yang menyebabkan nelayan dan muge berpartisipasi dalam kerusuhan tersebut?
8. Bagaimana pendapat bapak tentang penolakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh nelayan dan muge?
9. Sebenarnya, target protes tersebut ditujukan kepada siapa?
10. Dampak apa yang dirasakan dari kejadian tersebut?
11. Adakah perubahan yang terjadi setelah kerusuhan tersebut?
12. Di Susoh sendiri, apakah ini kali pertamanya terjadi kerusuhan? Atau pernah terjadi kerusuhan pada masa lalu?
13. Di daerah lain di sekitar kecamatan Susoh, apakah ada juga kerusuhan yang terjadi?
14. Pasca kejadian, ada beberapa yang dibawa ke kantor polisi, orang-orang itu siapa dan mengapa mereka dibawa?

● **Nelayan (panglima laot)**

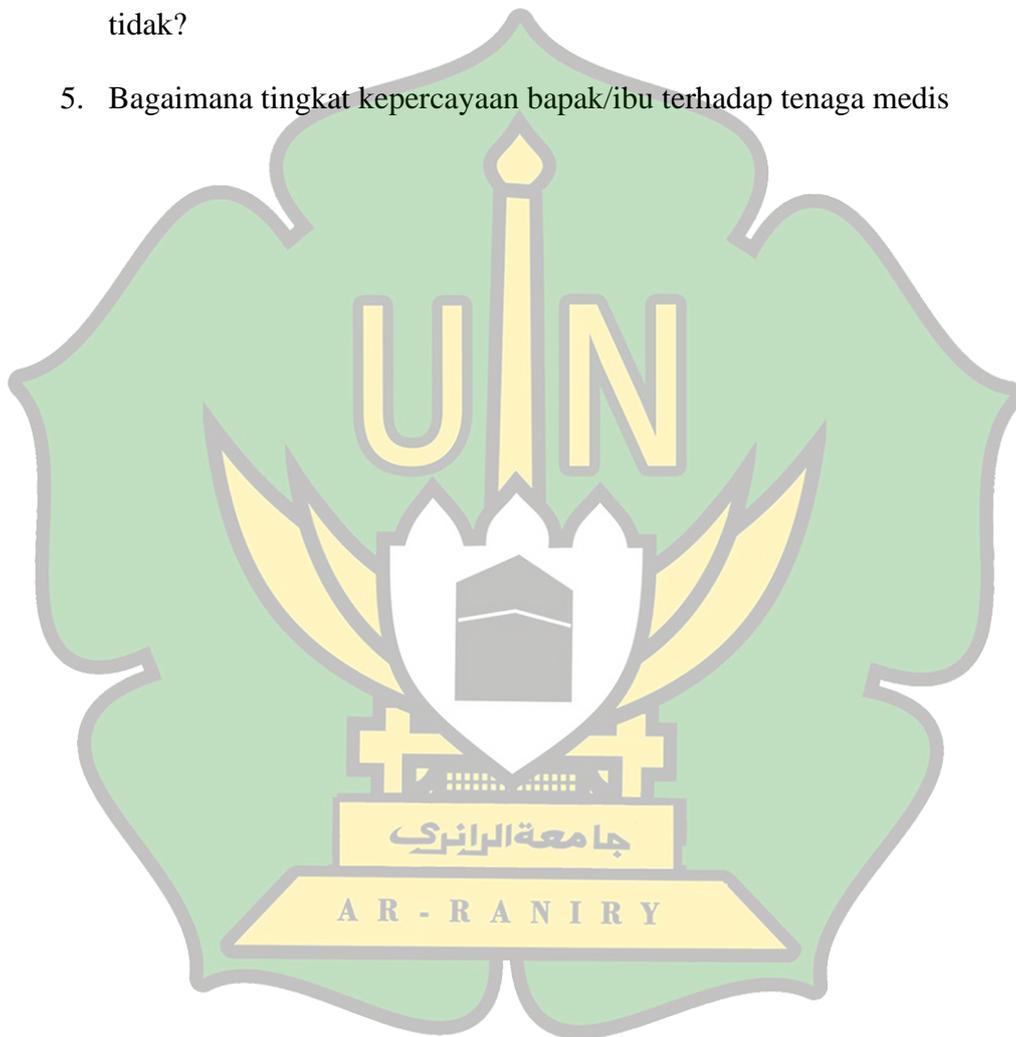
1. Apa yang menyebabkan nelayan berpartisipasi dalam kerusuhan tersebut?
2. Apakah yang mempengaruhi nelayan dalam melakukan kerusuhan tersebut? Atau murni karena ada dorongan dalam diri untuk ikut berpartisipasi?

3. Jika ada faktor pengaruh dari orang lain, apa motivasi anda untuk ikut bergabung dalam kerusuhan tersebut?
4. Apakah penurunan pendapatan menjadi faktor utama dalam melakukan kerusuhan tersebut?
5. Apakah ada pemimpin atau organisasi tertentu dalam kerusuhan tersebut?
6. Apakah kerusuhan tersebut terjadi begitu saja? Atau memang sudah direncanakan terlebih dahulu?
7. Apakah nelayan mengetahui bahwa akan ada sanksi dari kerusuhan tersebut? Jika ada apakah tidak ada ketakutan dalam diri nelayan?
8. Mengapa nelayan takut divaksin? Padahal sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa vaksin Covid-19 itu aman. Apakah nelayan kurang percaya kepada pemerintah?
9. Sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai dari protes yang dilakukan oleh tersebut?
10. Kesulitan apa yang dirasakan oleh para nelayan ketika pandemi terjadi?
11. Apakah kondisi pandemi membuat kehidupan nelayan lebih sulit dari sebelumnya? Lalu apa yang berbeda dari sebelum dan sesudah pandemi?

● **Masyarakat**

1. Menurut bapak/ibu, vaksinasi Covid-19 penting tidak dilakukan? Mengapa?
2. Apakah ada rasa takut dalam diri bapak/ibu terhadap vaksin Covid-19 atau tidak?

3. Apakah ibu mengetahui tentang kericuhan yang terjadi di PPI Ujung Serangga?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kerusuhan tersebut? Setuju atau tidak?
5. Bagaimana tingkat kepercayaan bapak/ibu terhadap tenaga medis



LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0150/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/01/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor Kapolsek Susoh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SRI MULTI MAILISA / 180801034**
Semester/Jurusan : / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Lampoh Drien

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Resistensi Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus: Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Januari 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Surat balasan dari Kecamatan Susoh


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN SUSOH
 Jalan Letkol BB. Jalal No. 13 Telp. (0659) 91004 Kode Pos 23765
SUSOH

Susoh, 09 Desember 2022

Nomor : 074 / 859 / 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi

1. Schubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri AR- RANIRY Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Nomor : B-2992 / Un.08/ FISIP.WD.I/PP.00.9/12/2022 Tanggal 05 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data) atas Nama :
2. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SRI MULTI MAILISA
NIM	: 180301034
Jurusan	: Ilmu Politik
Semester	: IX.
3. Demi kelancaran dalam pelaksanaan penelitian tersebut kami dapat menerima dan membantu serta mendukung segala sesuatunya terkait dengan data yang di butuhkan dalam pelaksanaan penelitian Mahasiswa tersebut, semoga dalam pelaksanaannya berjalan lancar.
4. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


جامعة الرانيري
AR - RANIRY


PEUKU NASRUL.S.K.M
 Pembina Tk. I /Nip. 19700423 199303 1 005

Surat balasan dari Kapolsek Susoh

KEPOLISIAN DAERAH ACEH
RESOR ACEH BARAT DAYA
SEKTOR SUSOH
Jalan Letkol BB Djulal 60 Susoh 23765

Nomor : B / 04 / 1 / 2023
Perihal : Rekomendasi

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib telah datang seorang Perempuan ke POLSEK SUSOH, yang mengaku bernama :

Nama : SRI MULTI MAILISA
NIM : 180801034
Agama : ISLAM
Jurusan : Ilmu Politik
Semester : IX

1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri AR- RANYRI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Nomor : B-12992 / Un.08/ FISIP.WD.1/PP.00.9/12/2022 Tanggal 05 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan data)
2. Maka dengan ini Demi Kelancaran dalam pelaksanaan penelitian tersebut kami telah menerima dan membantu serta mendukung segala sesuatu terkait dengan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian mahasiswa tersebut, semoga dalam pelaksanaannya berjalan lancar.
3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

ACEH Diketahui Oleh ;
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUSOH


BARMAWI. SE
AIDUN KOMISARIS POLISI NRP 74070736

LAMPIRAN 3: Dokumentasi Dengan Narasumber



Wawancara dengan mantan camat kecamatan Susoh melalui via WhatsApp



Wawancara dengan Kapolsek Susoh



Wawancara dengan nelayan (panglima laot)



Wawancara dengan masyarakat

